



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENANGANAN **GEMPA** CIANJUR 2022



SATGAS PENANGGULANGAN
BENCANA PUPR

PENANGANAN **GEMPA** CIANJUR

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara pemerintahan Indonesia dan masyarakat. Sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah serta masyarakat menjadi faktor kunci berhasilnya upaya mitigasi bencana.





PENANGANAN **GEMPA** **CIANJUR**

Pengarah

Achmad Gani Ghazaly Akman
Nazib Faizal

Tim Penulis

Komang Sri Hartini
Setia Dewi Prihapsari
Gama Ilmy Hartanto
Amalia Siti Rohmah
Mayta Utari
Ahmad Shohibuz Zakky Rosadi
Naufal Azaki
Rozi Abrori Fathurrochim
Nita Fikhriani Azhari
Shinta Afwa Nisaa
Muhammad Fathurrahman Wirasakti
Muhammad Gusti Hari
Solichin Syafril

November, 2022

Foto dan Dokumentasi

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana PUPR

Tata Letak

Siti Nurdini

Kontributor

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II

Hak Cipta

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Diterbitkan Oleh

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat





SEKAPUR SIRIH

Kata Sambutan Menteri PUPR

Indonesia merupakan negara republik dengan bentang kepulauan yang memiliki karakter khas. Demografinya ditandai dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat keragaman yang tinggi. Posisinya yang berada pada lokasi strategis sekaligus rawan bencana merupakan anugerah dari Tuhan yang dimaknai sebagai peluang bagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berpengaruh dan tangguh. Letaknya yang berada di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia memiliki peran strategis secara geopolitis. Di sisi lain, karena berada pada lingkaran cincin api Pasifik dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi menjadikan Indonesia negara yang rawan akan terjadi bencana alam baik geologis seperti erupsi gunung api, gempa bumi, dan tsunami maupun hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara pemerintahan Indonesia dan masyarakat. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR merupakan salah satu yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian PUPR memiliki peran strategis dalam penerapan teknologi yang dapat menurunkan risiko bencana. Di antaranya adalah pembangunan bendungan, bangunan pengendali banjir, sabo dam, jembatan bailey, serta bangunan tahan gempa.

Beberapa strategi digunakan Kementerian PUPR dalam upaya mitigasi bencana mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan. Dalam tahap perencanaan, risiko bencana menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta penerapan sertifikasi desain yang rekomendasinya dikeluarkan oleh para profesional pada desain infrastruktur sesuai dengan standar dan kriteria perencanaan.

Pada tahap pembangunan, dilakukan penerapan sertifikasi operasi dan pengawasan yang ketat agar sesuai dengan perencanaan. Kemudian setelah infrastruktur terbangun, di tahap pengelolaan dilakukan pemeliharaan dan pengoperasian yang memadai agar fungsi infrastruktur dapat terjaga dan berjalan optimal.

Meskipun dari kejadian bencana alam terkadang diperoleh dampak positif, namun secara umum bencana alam membawa dampak negatif bagi manusia. Tidak hanya kehilangan anggota keluarga dan kerabat namun juga kerugian secara ekonomi yang besar. Infrastruktur yang rusak, bangunan serta rumah yang hancur, aktivitas masyarakat yang terhenti, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Pemerintah harus mulai berbenah dan melaksanakan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang dan menumbuhkan kesiapsiagaan di masyarakat sejak dini. Pembangunan kembali bangunan dan rumah yang rusak harus mempertimbangkan daerah rawan bencana dan dengan struktur yang lebih kokoh terhadap ancaman bencana alam. Kewaspadaan dan budaya sadar bencana harus menjadi bagian dari pendidikan generasi muda Indonesia.




Dari kejadian bencana gempa bumi Cianjur, dapat diambil banyak pelajaran berharga bagi semua pihak. Bagi Kementerian PUPR, kejadian tersebut mempertegas peran perencanaan infrastruktur harus mempertimbangkan faktor rawan bencana. Edukasi dan pendampingan kepada masyarakat harus dilakukan berkesinambungan dalam menciptakan generasi yang sadar dan tangguh bencana. Dalam penanganan bencana alam tentu Kementerian PUPR bekerja sama dan saling mendukung dengan banyak pihak. Sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah serta masyarakat menjadi faktor kunci berhasilnya upaya mitigasi bencana.

M. Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat



KATA PENGANTAR

Kata Sambutan
Kepala Satgaslak
Cianjur 2022

Dari kejadian 
gempa bumi Cianjur
tahun 2022 serta
penanganannya,
banyak pelajaran
berharga baik
untuk masyarakat
maupun Pemerintah,
termasuk
Kementerian PUPR,
dan Pemerintah
Daerah dalam
menyikapi suatu
kejadian alam.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya maka Buku Penanganan Gempa Cianjur Tahun 2022 dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai repository of knowledge terhadap proses penanganan salah satu bencana gempa bumi di Indonesia yang berdampak cukup luas di masyarakat.

Gempa bumi merupakan bencana yang belum dapat diprediksi waktu terjadinya. Gempa bumi di Cianjur yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 cukup menyita perhatian masyarakat. Durasi yang cepat dengan titik gempa yang dangkal, getaran gempa dengan magnitudo 5,6 tersebut mengakibatkan banyak bangunan dan rumah rusak, memutus akses perekonomian masyarakat, serta menelan ratusan korban jiwa.

Dari kejadian gempa bumi Cianjur tahun 2022 serta penanganannya, banyak pelajaran berharga baik untuk masyarakat maupun Pemerintah, termasuk Kementerian PUPR, dan Pemerintah Daerah dalam menyikapi suatu kejadian alam. Pendekatan build back better, sebagai upaya mitigasi bencana di masa yang akan datang, digunakan untuk membangun kembali rumah dan bangunan yang hancur serta memulihkan kembali kehidupan dan aktivitas masyarakat. Selain itu, harus ditumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar menjadi masyarakat yang siap siaga.

Buku ini disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sejak kejadian bencana sampai dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sumber data berasal dari orang-orang yang melaksanakan koordinasi di lapangan, serta melibatkan beberapa narasumber yang turut serta secara langsung pada saat proses tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.



Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua unit organisasi dan unit kerja di Kementerian PUPR atas kerja sama dan dukungannya dalam penanganan gempa bumi Cianjur tahun 2022. Kami berharap Buku Penanganan Gempa Cianjur Tahun 2022 dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi semua pihak yang terlibat pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Salam tangguh bencana!

Jakarta, November 2022

Achmad Gani Ghazaly Akman
Ketua Satuan Tugas Pelaksana
Penanggulangan Bencana Kabupaten
Cianjur dan Sekitarnya

DAFTAR ISI

06

● Sekapur Sirih
Kata Sambutan
Menteri PUPR

08

● Kata Sambutan
Kepala Satgaslak
Cianjur 2022

KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA KEMENTERIAN PUPR

13
BAB 1

- Kerangka Regulasi | 14
- Kebijakan Umum Penanganan Bencana | 16

29
BAB 2

- Guncangan di Akhir Tahun:
Gempa Cianjur 2022 | 30
- Mobilisasi Sumber Daya:
Menghubungkan yang Putus,
Membuka yang Terisolir | 37
- Dukungan Dalam Evakuasi |
40
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Secara Mendesak | 42

47

BAB 3

- Pembentukan Satgaslak | **48**
- Pemulihan Kembali Konektivitas: Memperlancar Upaya Penanganan | **52**
- Perbaiki Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan Layanan Dasar Terjamin | **58**

- Pemulihan Sarana Prasarana Umum: Membangkitkan Geliat Kehidupan Cianjur | **64**
- Relokasi Permukiman di Zona Merah: Sebuah Langkah Mitigasi Strategis | **79**
- Rekonstruksi Permukiman Warga Terdampak: Menjamin Ruang Aman bagi Tiap Keluarga | **91**
- Penerjunan CPNS 2021: Momentum Pembekalan dan Pengalaman Generasi Muda | **94**

99

BAB 4

- Penguatan regulasi dan kelembagaan kebencanaan | **102**
- Memperkuat kesiapsiagaan sumber daya kebencanaan | **103**
- Perbaiki administrasi penyaluran bantuan di lapangan | **105**

- Memperbaiki kualitas pekerjaan rehabilitasi-rekonstruksi bangunan | **106**
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas | **107**
- Memperbaiki komunikasi, meminimalisir miskordinasi | **108**
- Mendorong penguatan kapasitas dan berdayanya Pemerintah Daerah | **110**

113

BAB 5

- Apa Kata Mereka | **114**

PENANGANAN **GEMPA** CIANJUR

**Kebijakan
Mitigasi Bencana
Kementerian PUPR**

- 
- Kerangka Regulasi
 - Kebijakan Umum Penanganan Bencana



KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA KEMENTERIAN PUPR

BAB 1

1. Kerangka Regulasi

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan *ring of fire* menyadari bahwa kerentanan akan bencana sangat tinggi baik geologis seperti gempa bumi dan gunung meletus hingga hidrometeorologi seperti banjir hingga kekeringan. Berbagai bencana tersebut seringkali menimbulkan dampak tidak hanya korban jiwa dan materi, namun juga kerusakan pada infrastruktur dan sarana-prasarana publik. Oleh karena itu sebagai salah satu instrumen penting kebijakan publik untuk mengatasi tantangan kebencanaan ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki seperangkat regulasi yang menjadi payung hukum (*legal blanket*) atas berbagai tindakan untuk memitigasi hingga merespon manakala suatu bencana terjadi. Berikut ini adalah regulasi yang telah dimiliki Indonesia khususnya yang menjadi ranah tugas Kementerian PUPR terkait kebencanaan.



Bahaya bencana tidak akan pergi. Namun adaptasi dan mitigasi dapat mengurangi dampaknya

- 
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
 5. PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
 6. Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
 7. Perpres Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
 8. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi
 9. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
 10. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 12. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 85/BNPB/II/2013 dan Nomor: 02/PKS/M/2013 tentang Penanggulangan Bencana Bidang Pekerjaan Umum

Adapun berbagai payung hukum di atas tidak akan efektif dilaksanakan tanpa instrumen kebijakan dan program sebagai bentuk *delivery* untuk mengatasi tantangan kebencanaan ini. Uraian berikut akan menjabarkan aspek kelembagaan hingga operasionalisasi kebijakan penanganan bencana khususnya yang menjadi ranah kewenangan Kementerian PUPR.

2. Kebijakan Umum Penanganan Bencana

World Economic Forum (WEF) melalui laporan rutinnya *“The Global Risks Report 2023”* menjabarkan tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini mayoritas berkaitan dengan bencana alam, perubahan iklim, dan perekonomian (krisis biaya hidup). Laporan yang disusun oleh 1.200 ahli dan ilmuwan tersebut menyebutkan bahwa baik dalam 2 ataupun 10 tahun mendatang, berbagai kerusakan akan terjadi akibat bencana alam hingga kegagalan dunia dalam memitigasi perubahan iklim.

Konteks Indonesia

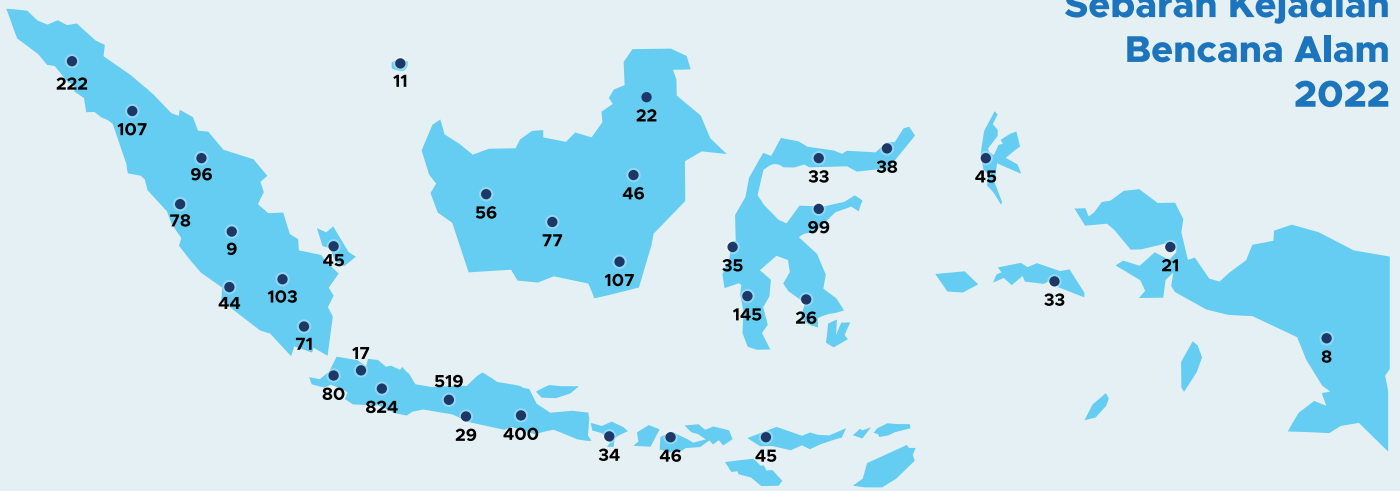
Bagi Indonesia, berbagai risiko tersebut sangat nyata dan bukan isapan jempol belaka. Data dari BNPB menunjukkan dalam kurun waktu 2019-2022 telah terjadi 17.437 kali bencana alam dengan total korban meninggal sebesar 2.440 orang dan 26.644.207 orang lainnya mengungsi. Pada tahun 2022 saja, telah terjadi 3.572 kali bencana alam yang meliputi gempa bumi (28 kali), letusan gunung api (1 kali), banjir (1.530 kali), cuaca ekstrem (1.065), tanah longsor (666 kali), karhutla (252 kali), gelombang pasang/ abrasi (26 kali), dan kekeringan (4 kali). Bahkan berbagai bencana di tahun 2022 telah mengakibatkan setidaknya 858 korban jiwa, 20.201 rumah rusak berat, serta kerugian materiel dan imateriel lainnya yang tak terhitung.



Berbagai kerusakan akan terjadi akibat bencana alam hingga kegagalan dunia dalam memitigasi perubahan iklim



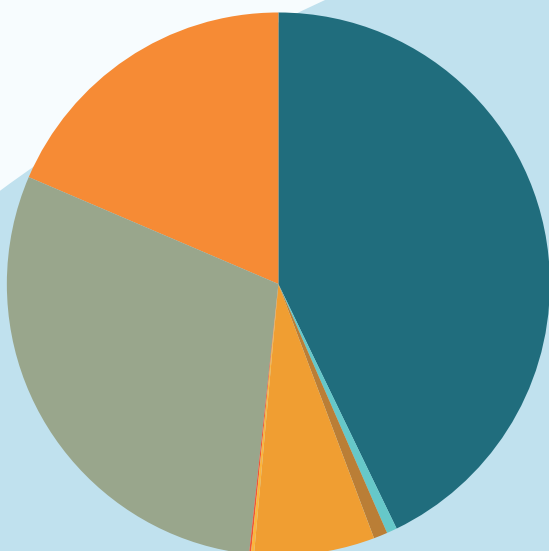
Sebaran Kejadian Bencana Alam 2022



Jumlah Kejadian Bencana Alam 2014-2022

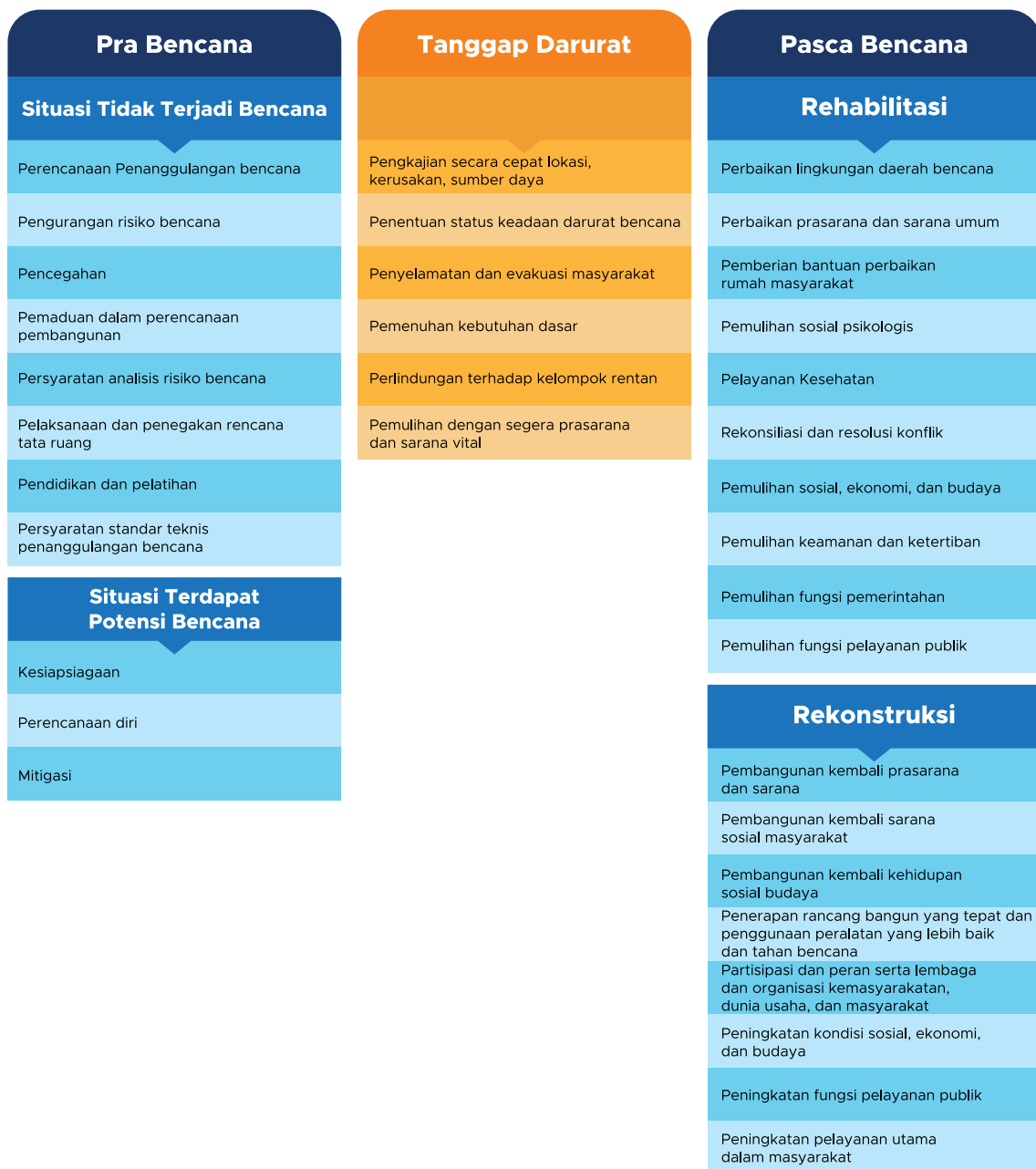


Persentase Kejadian Bencana Alam Tahun 2022



Letak geografis Indonesia yang berada di himpitan empat lempeng tektonik antara lain Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Laut Filipina membuat kawasan ini sangat rawan terjadi bencana baik geologis maupun hidrometeorologi. Selain itu, bagian selatan dan barat Indonesia tepatnya dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi juga memanjang sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang menyebabkan kerawanan akan

bencana gunung meletus, tanah longsor hingga tsunami. Kondisi ini membuat tidak ada pilihan lain selain merancang langkah mitigasi hingga respon manakala berbagai bencana tersebut terjadi. Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menyusun serangkaian strategi kebencanaan sebagaimana yang tertuang dalam ilustrasi berikut ini.



Kelembagaan Penanganan Bencana Kementerian PUPR

Infrastruktur publik berupa prasarana dan sarana selalu tidak luput dari kerusakan manakala terjadi bencana. Berdasarkan data dari BNPB, pada tahun 2022 saja dari ribuan bencana yang terjadi menyebabkan 1.240 sarana pendidikan rusak, 95 sarana kesehatan rusak, 95.429 unit rumah rusak ringan hingga berat, 1.120.961 bangunan terendam, dan lain-lain. Kondisi ini mendorong Kementerian PUPR untuk secara inisiatif dan aktif terlibat dalam penanganan kebencanaan mulai dari langkah mitigasi, tanggap darurat, hingga proses rekonstruksi pasca bencana dimana sarana prasarana tersebut merupakan bagian dari *delivery* Kementerian PUPR.

Pengaturan tentang langkah menghadapi bencana telah tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Satgas PPB). Adapun rangkaian kegiatan kebencanaan yang diatur dalam Kepmen tersebut ialah penanganan dampak bencana yang meliputi bencana alam, non-alam, dan sosial. Rangkaian kegiatan penanganan dampak bencana tersebut dilakukan dengan berbagai langkah sebagai berikut:

1. Menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan di daerah terdampak bencana.
2. Menyediakan fasilitas air bersih/air minum, sanitasi dan hunian sementara bagi korban bencana dengan memperhatikan aksesibilitas yang responsif gender.
3. Melaksanakan upaya pemulihan pasca bencana meliputi relokasi korban terdampak bencana apabila diperlukan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Menangani dampak kerusakan terhadap infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan penanganan kerusakan terhadap infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Melalui Keputusan Menteri tersebut, Satgas PPB PUPR memiliki organisasi yang terdiri atas:

1. Pusat Komando
2. Unit Pendukung
3. Unit Pelaksana

Pusat Komando terdiri dari unsur pimpinan yang berperan sebagai pengarah, penentu kebijakan, pengambil keputusan, dan pengendali kegiatan penanggulangan bencana pada Tahap Pra Bencana, Tahap Darurat Bencana, dan Tahap Pasca Bencana. Adapun keanggotaan Pusat Komando terdiri dari:

1. Ketua Satgas
2. Wakil Ketua
3. Ketua Harian Pusat Komando
4. Sekretaris
5. Anggota

Unit Pendukung merupakan unit koordinasi dan Pos Pendukung Direktorat Jenderal di masing-masing unit organisasi yang membantu tugas sehari-hari Pusat Komando Satgas PPB. Unit Pendukung terdiri dari:

- 1. Sekretariat Satgas PPB PUPR.**
Keanggotaannya ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- 2. Pos Pendukung Direktorat Jenderal.**
Ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan berada di tiap unit organisasi/direktorat jenderal.
- 3. Pos Siaga Bencana.**
Berkedudukan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah di setiap provinsi.

Unit Pelaksana merupakan Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Tugas yang melaksanakan komando/perintah dari Pusat Komando dan berada di bawah koordinasi Unit Pendukung. Unit Pelaksana terdiri dari:

- 1. Satuan Tugas Pelaksana (Satgaslak).**
Dibentuk oleh Sekretaris Jenderal apabila diperlukan.
- 2. Tim Reaksi Cepat (TRC).**
Ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan/atau masing-masing Direktur Jenderal serta berkedudukan di Sekretariat Satgas PPB PUPR, dan/atau Pos Pendukung Direktorat Jenderal masing-masing, dan/atau Balai Besar/Balai/Satker untuk melaksanakan kaji cepat kebutuhan darurat bencana.
- 3. Satuan Tugas (Satgas) Darurat Bencana.**
Dibentuk oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang akan diaktifkan segera setelah terjadi bencana untuk melaksanakan kegiatan darurat bencana.
- 4. Pelaksana Pemulihan Pasca Bencana.**
Dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi sesuai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan pemulihan pascabencana.

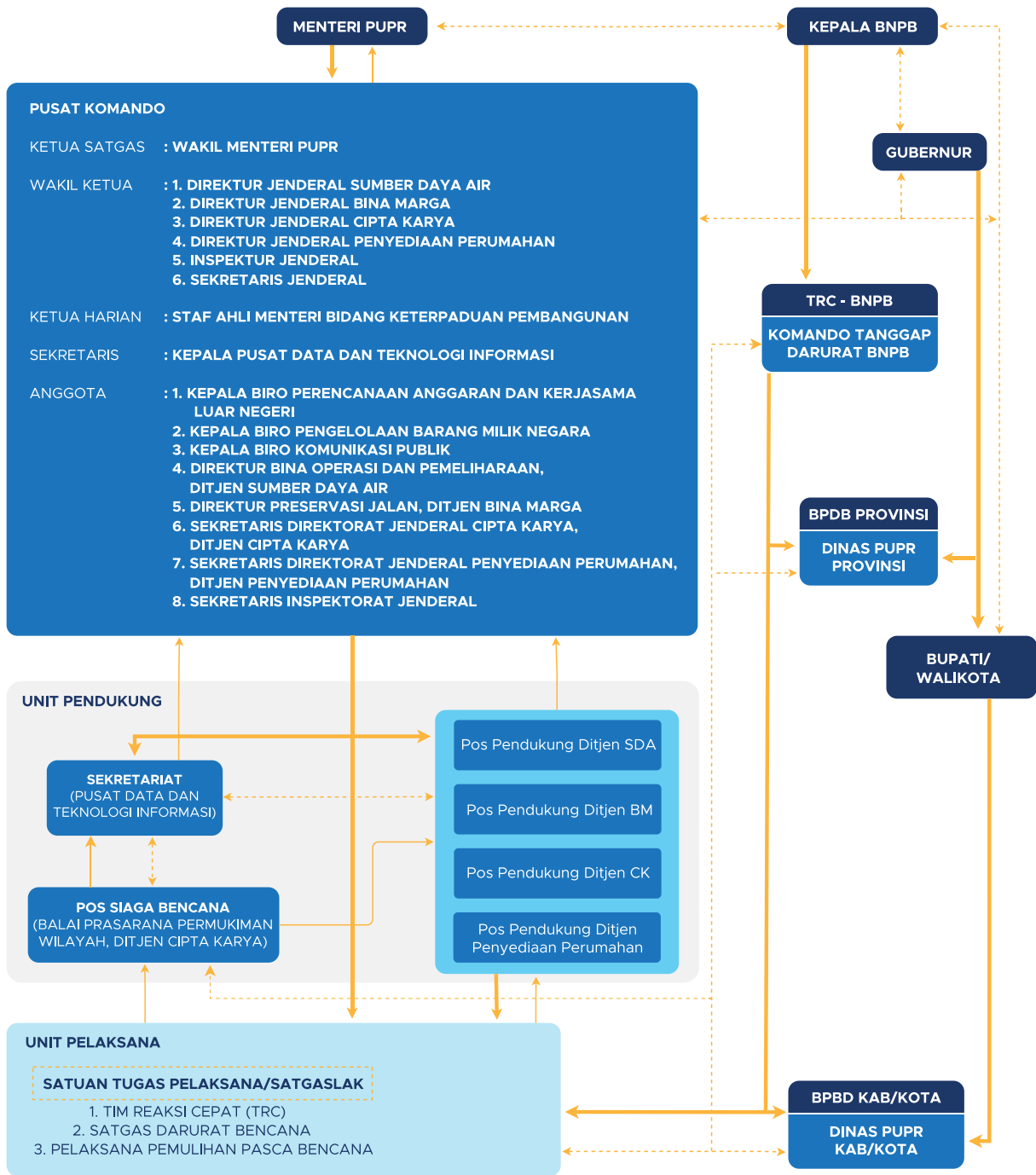


Satgas PPB PUPR memiliki organisasi yang terdiri atas: Pusat Komando, Unit Pendukung, Unit Pelaksana



Adapun bagan alir tata kerja SATGAS PPB PUPR diilustrasikan sebagai berikut

BAGAN ALIR TATA KERJA SATGAS PPB PUPR



Keterangan :

- Jalur Komando/Perintah
- ↔ Jalur Koordinasi
- Jalur Pelaporan
- ⋯ Dibentuk apabila diperlukan

Program Infrastruktur Kementerian PUPR

Kementerian PUPR menyadari bahwa langkah mitigatif harus menjadi arus utama kebijakan kebencanaan. Oleh karenanya telah dikeluarkan serangkaian kebijakan yang komprehensif berkenaan dengan upaya mengurangi dampak risiko manakala terjadi bencana. Salah satunya ialah dengan diterbitkannya Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi melalui Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 21 Tahun 2007. Pedoman tersebut memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan ruang kawasan yang berpotensi menimbulkan letusan gunung berapi dan gempa bumi berdasarkan pertimbangan karakteristik fisik alami dan aktivitas manusia yang memberi dampak terjadinya letusan gunung berapi.

Selain itu, menaruh perhatian pada infrastruktur ketahanan bencana/iklim (*climate-resilient infrastructure*) juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kebencanaan serta perubahan iklim. Pada sektor infrastruktur permukiman misalnya, Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, hingga teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) sebagai rumah dengan desain modular yang tahan gempa. Pada sektor infrastruktur konektivitas, Kementerian PUPR telah memperkenalkan jalan berkelanjutan sebagai konsep penyelenggaraan jalan yang memuat prinsip-prinsip *sustainability* meliputi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Adapun penilaian Jalan Tol Berkelanjutan (JTB) telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan berhasil dalam mempromosikan infrastruktur hijau dan ramah lingkungan.



RISHA untuk Relokasi Dampak Siklon Tropis Seroja di Desa Tamakh, Prov. NTT



RISHA untuk Dampak Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah



Perhatian pada infrastruktur ketahanan bencana/iklim (*climate-resilient infrastructure*) juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kebencanaan serta perubahan iklim

Pada sektor sumber daya air, Kementerian PUPR telah dan sedang membangun berbagai bangunan pengendali daya rusak air seperti contohnya pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi untuk mengatasi banjir di area DKI Jakarta. Selain pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak air, program normalisasi sungai dari hulu hingga hilir juga terus diperbesar skala dan cakupannya yang tersebar di berbagai ruas wilayah sungai di Indonesia.

Perubahan iklim akibat emisi karbon turut menyebabkan kenaikan muka air laut (sea level rise). Sebagai negara kepulauan (*archipelago*) hal ini tentu merupakan ancaman eksistensial (*existential threat*). Sebagai respon atas hal tersebut, berbagai proyek infrastruktur pengamanan pantai/pesisir juga telah dan sedang dikerjakan, seperti pada proyek *National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)*.



Bendungan Ciawi untuk Pengendali Banjir

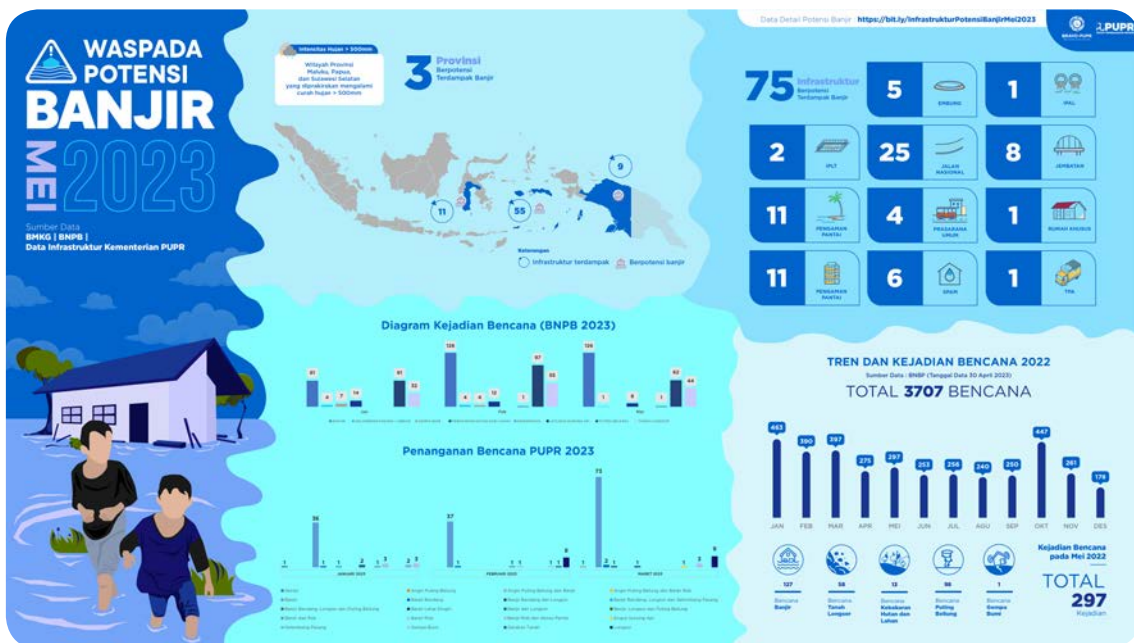


Kementerian PUPR telah dan sedang membangun berbagai bangunan pengendali daya rusak air

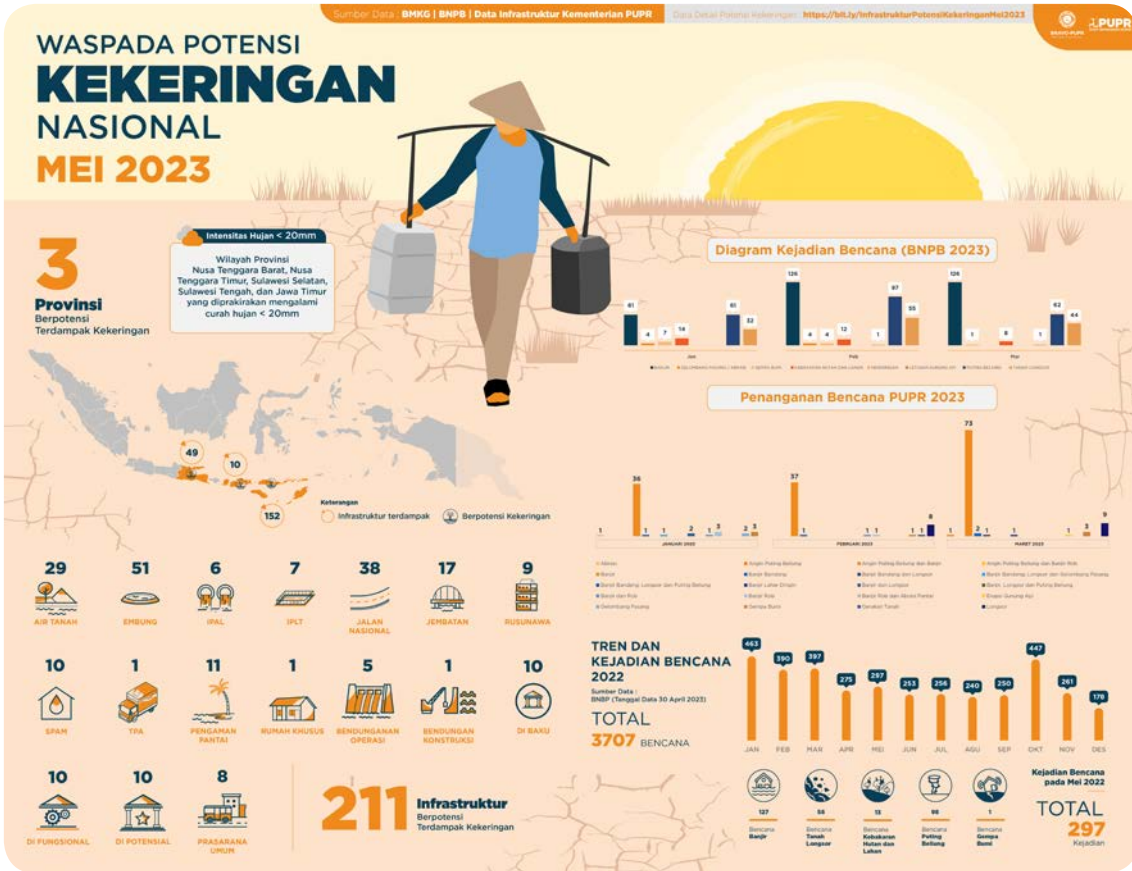
Early Warning System: Mengabarkan Jaringan Kementerian Akan Potensi Bencana

Langkah mitigasi tidak akan berdampak maksimal tanpa menggerakkan setiap unsur dari Kementerian PUPR untuk ikut waspada akan potensi bencana. Hal itulah yang mendorong inisiatif dalam membuat infografis potensi bahaya yang disampaikan kepada jajaran balai dan satker di lingkungan Kementerian PUPR di daerah agar bersiap siaga serta

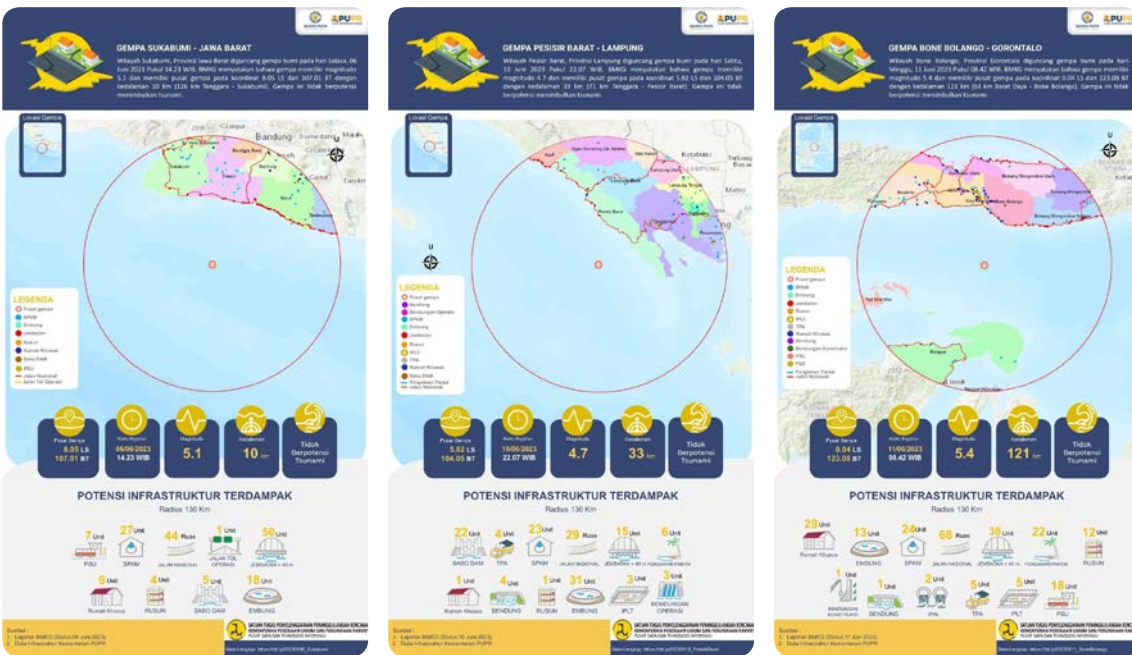
mengantisipasi kemungkinan dampak yang terjadi pada infrastruktur PUPR di wilayahnya masing-masing. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan *early warning* yang disampaikan kepada masyarakat melalui BMKG atau instansi lain yang berwenang.



Ilustrasi Potensi Bencana Banjir Selama Bulan Mei Tahun 2023



Ilustrasi Potensi Bencana Kekeringan Selama Bulan Mei Tahun 2023



Ilustrasi Early Warning System Potensi Infrastruktur Terdampak Gempa Bumi

Keterlibatan yang Berjejak

Jejak keterlibatan Kementerian PUPR dalam penanganan bencana dapat terlihat di hampir semua bencana besar yang terjadi seperti pada bencana gempa bumi dan tsunami Palu tahun 2018, gempa Lombok tahun 2018, banjir bandang dan Badai Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), tanah longsor di Sumedang, dan sebagainya. Hal ini menjadi perwujudan atas kehadiran negara melalui Kementerian PUPR untuk membantu proses rekonstruksi dan pemulihan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali normal serta merasa aman dari bencana susulan.

Buku ini secara khusus akan mengulas perihal wujud kehadiran negara di Gempa Bumi Cianjur tahun 2022 hingga penanganannya sampai tahun 2023. Buku ini diharapkan dapat menjadi *knowledge repository*, pembelajaran, dan bukti akan sebuah aksi; karena sumber terpenting aksi adalah kemampuan mengawal tiap kebijakan dan program menjadi kerja yang berjejak dan bermanfaat bagi masyarakat.




Keterlibatan Kementerian PUPR di beberapa bencana



Keterlibatan Kementerian PUPR di beberapa bencana

PENANGANAN **GEMPA** CIANJUR

**Gempa Cianjur
Tahun 2022:
Kehadiran Negara
Dalam Tanggap
Darurat**

- 
- **Guncangan di Akhir Tahun: Gempa Cianjur 2022**
 - **Mobilisasi Sumber Daya: Menghubungkan yang Putus, Membuka yang Terisolir**
 - **Dukungan Dalam Evakuasi**
 - **Pemenuhan Kebutuhan Dasar Secara Mendesak**

KEHADIRAN NEGARA DALAM TANGGAP DARURAT

2 BAB

1. Guncangan di Akhir Tahun: Gempa Cianjur 2022

Pada hari Senin, 21 November 2022 tepat pukul 13.21 WIB, gempa mengguncang Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Gempa ini memiliki magnitudo 5,6 dengan titik episentrum pada koordinat 6,84 LS dan 107,05 BT, berlokasi di darat 10 km Barat Daya Kabupaten Cianjur dan dengan kedalaman 10 km. Gempa ini juga terasa hingga Kota Bandung, DKI Jakarta, dan Kota Tangerang. Bahkan BMKG mencatat hingga tanggal 28 November 2022 telah terjadi 303 kali gempa susulan.

Kejadian Gempa di Cianjur memiliki sejarah yang panjang. Sebagaimana dilansir dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, S.Si, M.Si, gempa bumi yang menyebabkan kerusakan di Cianjur-Sukabumi telah terjadi sebanyak 14 kali. Gempa pertama yang didokumentasikan BMKG terjadi pada tahun 1844. Akibat gempa tersebut, banyak bangunan rumah warga yang rusak.



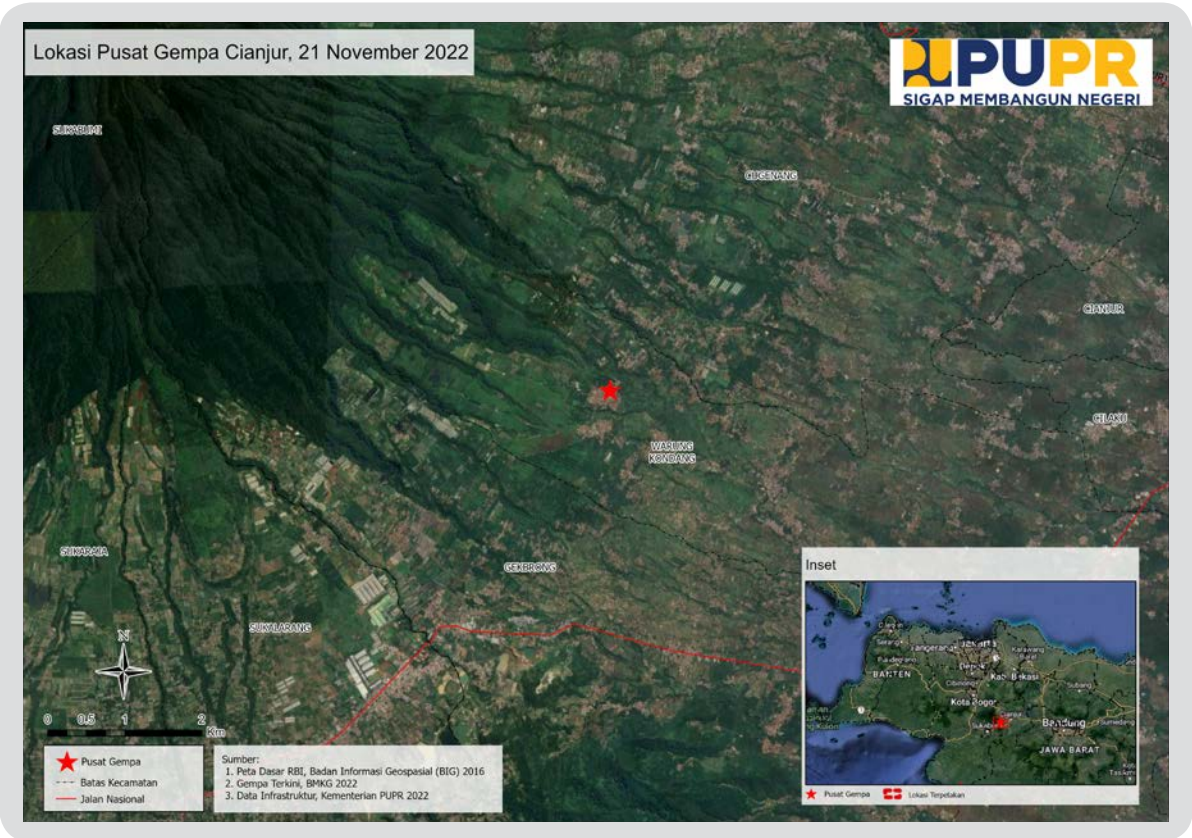
Gempa bumi yang menyebabkan kerusakan di Cianjur-Sukabumi telah terjadi sebanyak 14 kali



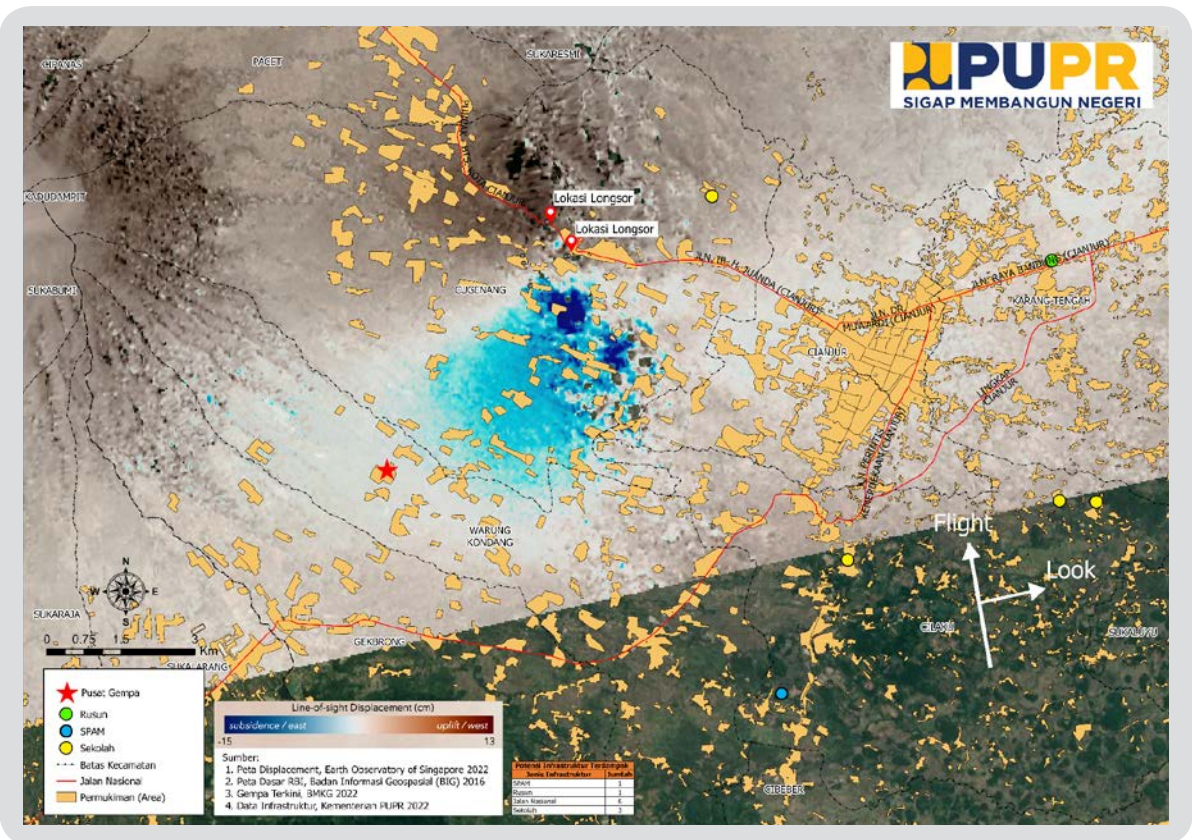
Rentetan panjang gempa Cianjur dan sekitarnya juga terjadi pada tahun 1879, 1900, 1910, 1912, 1969, 1973, hingga tahun 2000-an. Seperti gempa yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1982 memiliki magnitudo 5,5 yang menyebabkan banyak rumah rusak dan korban luka-luka. Gempa dengan kerusakan lebih besar terjadi pada 12 Juli 2020 dengan kekuatan M 5,4 dan M 5,1 yang menyebabkan 1.900 rumah rusak berat di beberapa kecamatan. Setelah itu, terjadi kembali gempa bumi di Sukabumi pada 12 Juni 2011 dengan kekuatan M 4,9 pada 4 Juni 2012 dengan M 6,1 pada 8 September 2012 dengan M 5,1 dan sebelum tahun 2022,

terjadi gempa pada 11 Maret 2020 dengan kekuatan M 5,1 yang menyebabkan 760 rumah rusak di Sukabumi.

Berbagai kejadian yang telah terjadi sebelumnya seperti yang diuraikan di atas menjadi bukti bahwa Cianjur dan sekitarnya merupakan daerah rawan terjadi gempa. Secara tektonik, Cianjur, Sukabumi, Lembang, Purwakarta, dan Bandung merupakan kawasan seismik aktif. Kejadian yang berulang menjelang penghujung tahun 2022 menjadi sinyal kuat perlunya langkah antisipasi yang lebih serius.



Titik Gempa Cianjur 21 November 2022



Peta Land Displacement

Berdasarkan data dari GIS BNPB (status: 2 Februari 2023), Gempa Cianjur tahun 2022 mengakibatkan 602 orang meninggal dunia, 5 orang dinyatakan hilang, dan 7.810 orang luka-luka. Meskipun tidak berpotensi tsunami, gempa ini telah mengakibatkan 67.504 rumah rusak, di antaranya sebanyak 21.465 tergolong rusak berat. Selain itu, berbagai fasilitas dan sarana prasarana publik ikut mengalami kerusakan. Berdasarkan data hasil asesmen Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, teridentifikasi sebanyak 262 gedung perkantoran, 632 fasilitas pendidikan, 281 fasilitas ibadah, 48 fasilitas kesehatan, dan 6 pasar. Selain itu juga terdapat kerusakan SPAM di 10 titik.



Kerusakan Jaringan Pipa di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang



Kerusakan Bangunan di SMPN 1 Warungkondang



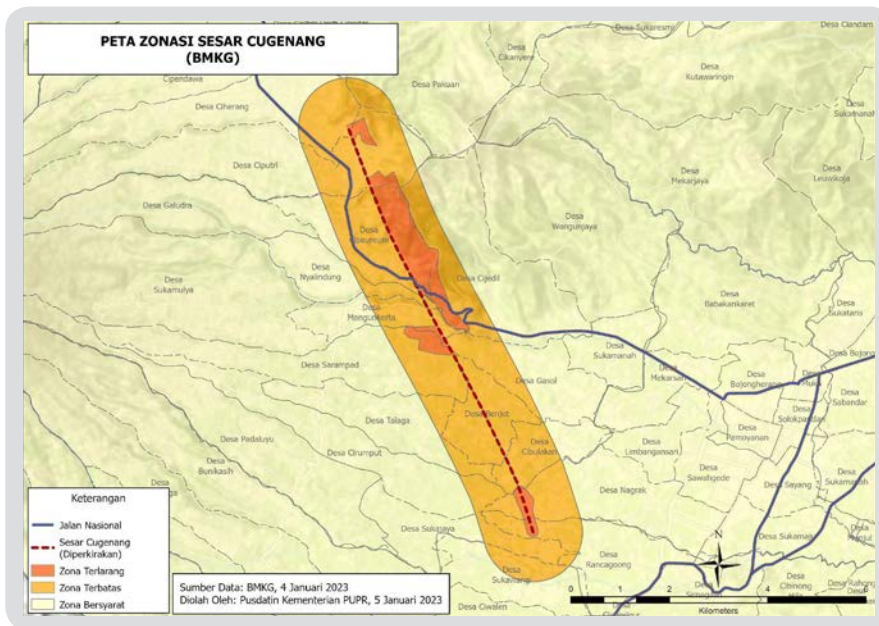
Kerusakan Bangunan di RSUD Sayang



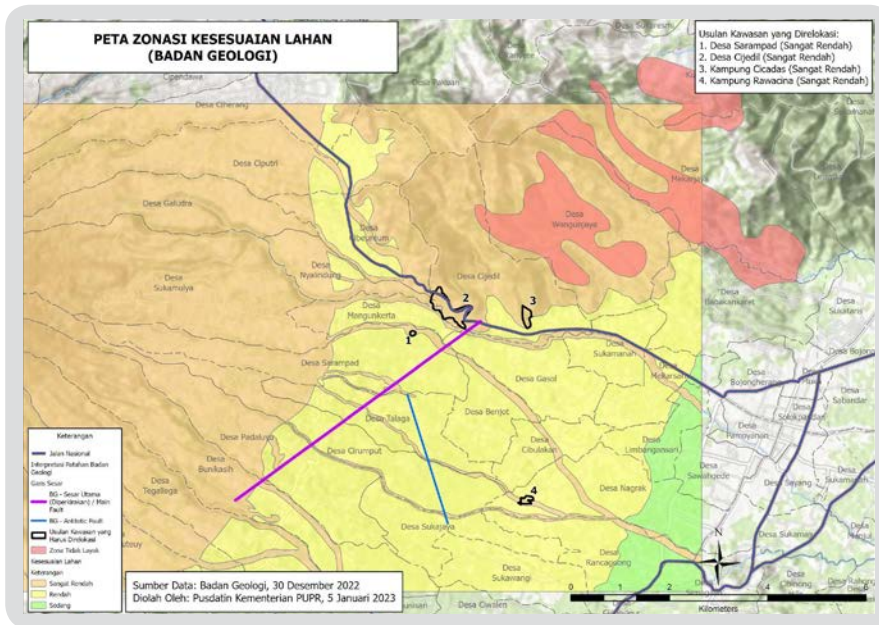
Berbagai Dampak Kerusakan Gempa Cianjur 2022

Sementara itu Badan Geologi Kementerian ESDM, BMKG, dan BRIN telah mencoba mengidentifikasi letak persis sesar Cugenang yang ditengarai menjadi penyebab gempa. Meskipun ke depan masih memerlukan kajian lebih dalam, beberapa hasil identifikasi ini menunjukkan adanya potensi sesar yang berpotensi menimbulkan gempa di masa mendatang.

Penelitian oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghasilkan Peta Indikasi Sesar Cugenang yang melintang dari barat laut ke tenggara. BMKG menetapkan area yang terindikasi dilalui sesar Cugenang menjadi 3 zona yaitu zona terlarang, zona terbatas dan zona bersyarat.



Peta Identifikasi Cesar Cugenang oleh BMKG



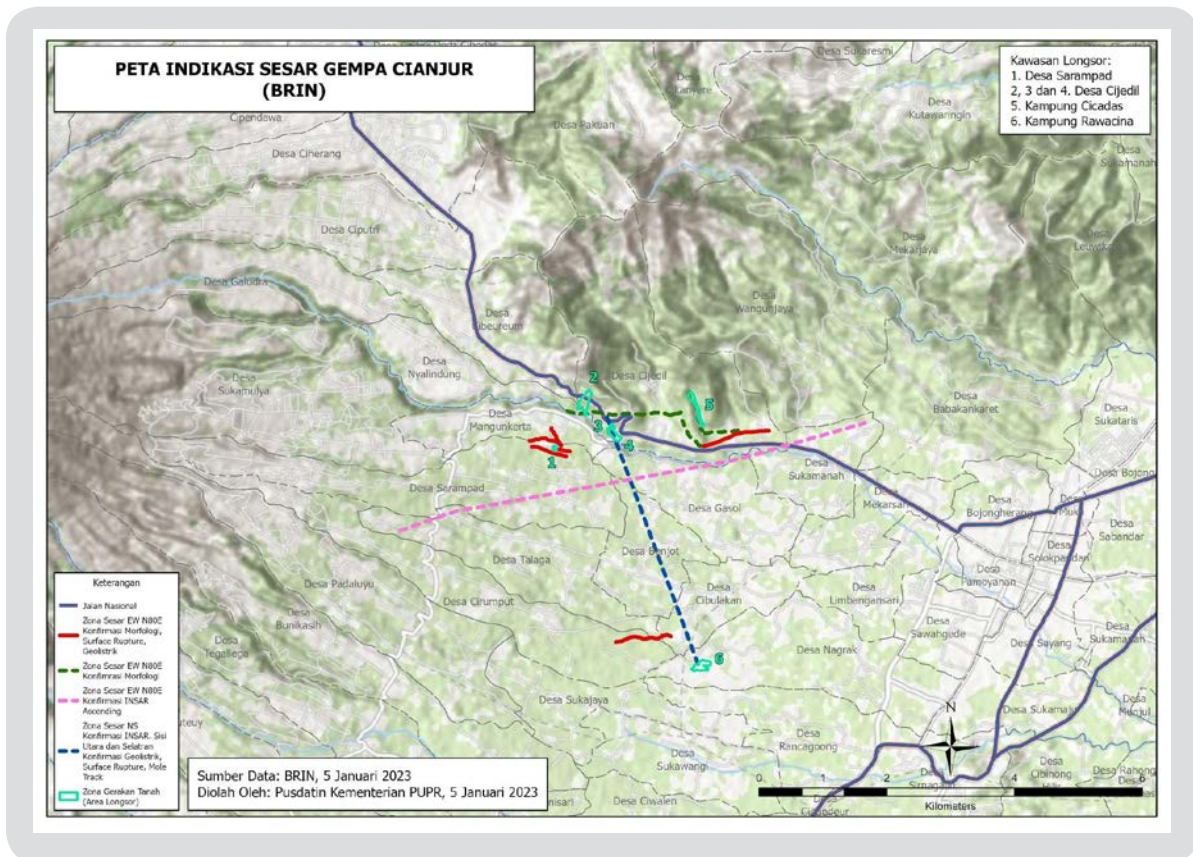
Peta Identifikasi Cesar Cugenang oleh Badan Geologi

Penelitian oleh Badan Geologi menghasilkan Peta Kesesuaian Lahan Badan Geologi menunjukkan indikasi sesar yang melintang dari barat daya ke timur laut. Badan Geologi menetapkan area yang terindikasi dilalui oleh sesar utama menjadi 3 zona kelayakan hunian yaitu zona sangat rendah, zona rendah dan zona sedang.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghasilkan Garis Indikasi Sesar di Wilayah Terdampak Gempa Cianjur, yaitu:

- Sesar EW N80E Konfirmasi Morfologi, *Surface Rupture*, Geolistrik
- Sesar EW N80E Konfirmasi Morfologi
- Sesar EW N80E Konfirmasi INSAR *Ascending*
- Sesar NS Konfirmasi INSAR, Sisi Utara dan Selatan Konfirmasi Geolistrik, *Surface Rapture*, *Mole Track*

Ke depan diperlukan kajian yang komprehensif antarinstansi untuk mengidentifikasi lokasi sesar sehingga langkah-langkah mitigasi di masa mendatang dapat dilakukan dengan optimal.



Peta Identifikasi Sesar Gempa Cianjur oleh BRIN



Kunjungan langsung Bapak Presiden ke lokasi terdampak gempa bumi untuk memastikan penanganan berjalan dengan cepat dan tepat

Melalui Surat Keputusan Bupati Cianjur No. 360/Kep.376-BPBD/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, ditetapkan status tanggap darurat di Kabupaten Cianjur berlaku selama 30 hari yang berlaku sejak tanggal 21 November hingga 20 Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

Kementerian PUPR atas arahan Presiden Joko Widodo langsung mengambil langkah-langkah taktis yang diperlukan. Serumit apapun tantangan kebijakan publik yang dihadapi, bagaimana

negara (pemerintah) menyelesaikan tantangan tersebut dan sejauh mana kesuksesan dicapai tergantung pada kapasitas negara (Howlett, 2020). Semakin tinggi kompleksitas masalah yang dihadapi, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan, ditambah semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat pada keefektifan penanganan, membuat tantangan ini semakin rumit (Howlett, 2020).

Bencana Cianjur 2022 menjadi bukti bagaimana Pemerintah menggunakan kapasitasnya untuk hadir dalam tanggap darurat secara cepat di lapangan.

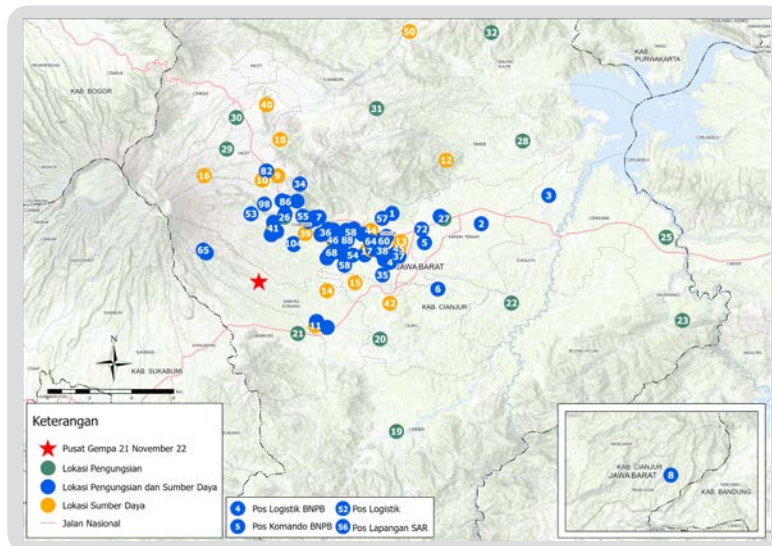


Ditetapkan status tanggap darurat di Kabupaten Cianjur berlaku selama 30 hari yang berlaku sejak tanggal 21 November hingga 20 Desember 2022

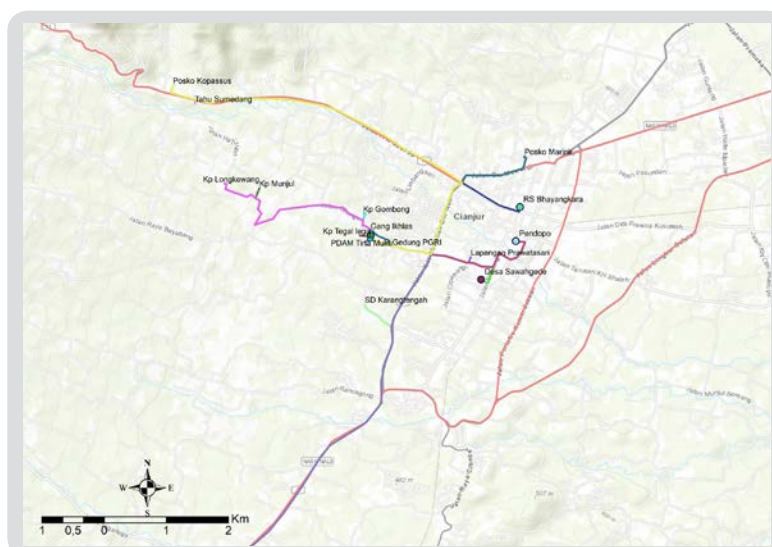
2. Mobilisasi Sumber Daya: Menghubungkan yang Putus, Membuka yang Terisolir

Langkah tanggap darurat dilakukan dengan fokus utama mengembalikan fungsi infrastruktur secara darurat, meliputi akses/konektivitas, sarana prasarana dasar, dan evakuasi. Penanganan tanggap darurat membutuhkan sumber daya yang begitu besar. Secara umum sumber daya kebencanaan tidak terbatas

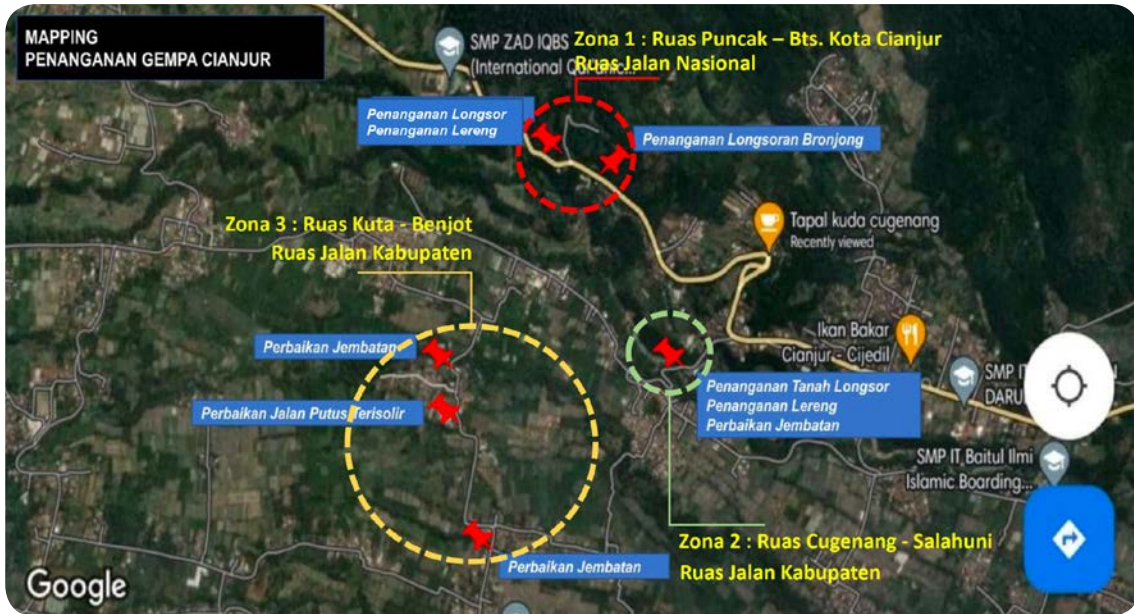
pada anggaran, tenaga kerja, alat dan material (*machinery*) saja melainkan juga teknologi dan *social capital*. Dalam penanganan gempa Cianjur yang lalu, berbagai sumber daya telah dikerahkan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, hingga keterlibatan masyarakat luas.



Peta Sebaran Sumber Daya PUPR tanggal 14 Desember 2022



Peta Jalur Akses Lokasi Sumber Daya



Lokasi Penanganan Tanggap Darurat Jalan

Tanggap darurat gempa Cianjur dilakukan dengan fokus pada memperbaiki jalur akses dari dan menuju Kab. Cianjur utamanya di Ruas Jalan Cianjur - Cipanas (area Cugenang) yang sempat terputus akibat longsor. Ditjen Bina Marga dan BBPJJN DKI Jakarta - Jabar mengambil langkah cepat atas komando Ketua Harian Satgas PBB dengan mobilisasi alat berat sejumlah 19 unit yang terdiri atas 7 unit *excavator*, 6 unit *loader* dan *dozer*, 5 unit *dump truck*, 1 unit genset. Kegiatan pembukaan jalan dilakukan pada dua sisi

jalan yang terputus yaitu dari arah Cianjur yang dilaksanakan oleh BBWS Citarum dan dari Puncak oleh BBPJJN DKI Jakarta - Jabar yang dibantu oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT Wika yang sedang melaksanakan pekerjaan di sekitar lokasi bencana. Dalam kurun waktu 17 Jam (Selasa, 22 November 2022 pukul 06.30), akses utama area Cugenang dapat kembali dilalui meskipun masih secara terbatas 1 lajur. Melalui bantuan pihak kepolisian mobilisasi logistik dapat segera dilakukan.



Pembukaan Jalur dari Sisi Kabupaten Cianjur



Kunjungan Kementerian PUPR dan Gubernur Jawa Barat ke lokasi



Pembukaan Kembali Akses yang Sempat Terputus

Dalam upaya membuka akses yang sempat terputus, mobilisasi alat berat juga dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Air, BBWS Citarum dan BBWS Ciliwung Cisadane sejumlah 24 unit yang terdiri atas 8 unit *excavator*, 1 unit *loader* dan *dozer*, 11 unit *dump truck*, 1 unit genset dan 1 unit lampu penerangan dikerahkan.



Fokus pada memperbaiki jalur akses dari dan menuju Kab. Cianjur utamanya di Ruas Jalan Cianjur - Cipanas

3. Dukungan Dalam Evakuasi

Proses pencarian dan evakuasi korban Gempa Cianjur dilakukan oleh Basarnas, BNPB, BPBD, TNI, Polri, relawan dan masyarakat yang berjumlah 8.094 orang. Namun pada beberapa lokasi, evakuasi menjadi tantangan tersendiri dikarenakan lokasi yang sulit dijangkau maupun tertutup oleh reruntuhan bangunan. Dalam hal ini, Kementerian PUPR membantu proses evakuasi korban dengan mengerahkan bantuan peralatan untuk membuka akses ke lokasi pencarian korban dan menangani longsoran yang menimbun warga. Hingga akhir masa tanggap darurat telah ditemukan 602 orang meninggal dunia, 114.683 orang direlokasi ke pengungsian, dan 5 orang masih hilang. (<https://gis.bnpb.go.id/cianjur2022/>; 2 Februari 2023). Pencarian korban sempat terkendala akibat cuaca dan potensi longsor yang dapat terjadi kapanpun mengingat gempa susulan masih sering terjadi. Selain itu, kerumunan warga yang sekedar ingin melihat lokasi longsoran juga menyulitkan proses evakuasi dan tanggap darurat. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk tidak berkerumun melihat proses penanganan bencana sangat dibutuhkan dengan dibantu pengkondisian oleh aparat kepolisian.

Pasca kejadian gempa, pada tanggal 22 November 2022 mulai didirikan posko pengungsian sebanyak 6 titik lokasi di antaranya di RSUD Sayang Cianjur, RS Hafidz Cianjur, RS Bhayangkara, Posko Tahu Sumedang Cugenang, serta Pendopo dan Taman Prawatasari Joglo. Seiring dengan berjalannya waktu, titik pengungsian korban bencana di Cianjur semakin bertambah dan menyebar dikarenakan warga menginginkan tempat pengungsian yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Hingga puncaknya terjadi di tanggal 15 Desember 2022, tercatat jumlah lokasi pengungsian mencapai 112 titik. Guna mengatasi hal tersebut, Tim Tanggap Darurat Kementerian PUPR menyisir lokasi-lokasi yang kemungkinan masih terisolir dan memerlukan peralatan dasar. Selain itu, tim juga melakukan sosialisasi kepada warga yang terdampak untuk memberikan informasi kepada warga rekan-rekannya di lokasi lain agar dapat melapor ke Posko Tanggap Darurat Kementerian PUPR yang ada di Kantor PDAM Tirta Mukti apabila membutuhkan peralatan dasar di lokasi pengungsian. Jumlah titik pengungsian per tanggal 21 Maret 2023 telah berkurang menjadi sebanyak 66 titik pengungsian.



Pencarian Korban yang Tertimbun Longsoran



Beberapa Lokasi Pengungsi Gempa Cianjur

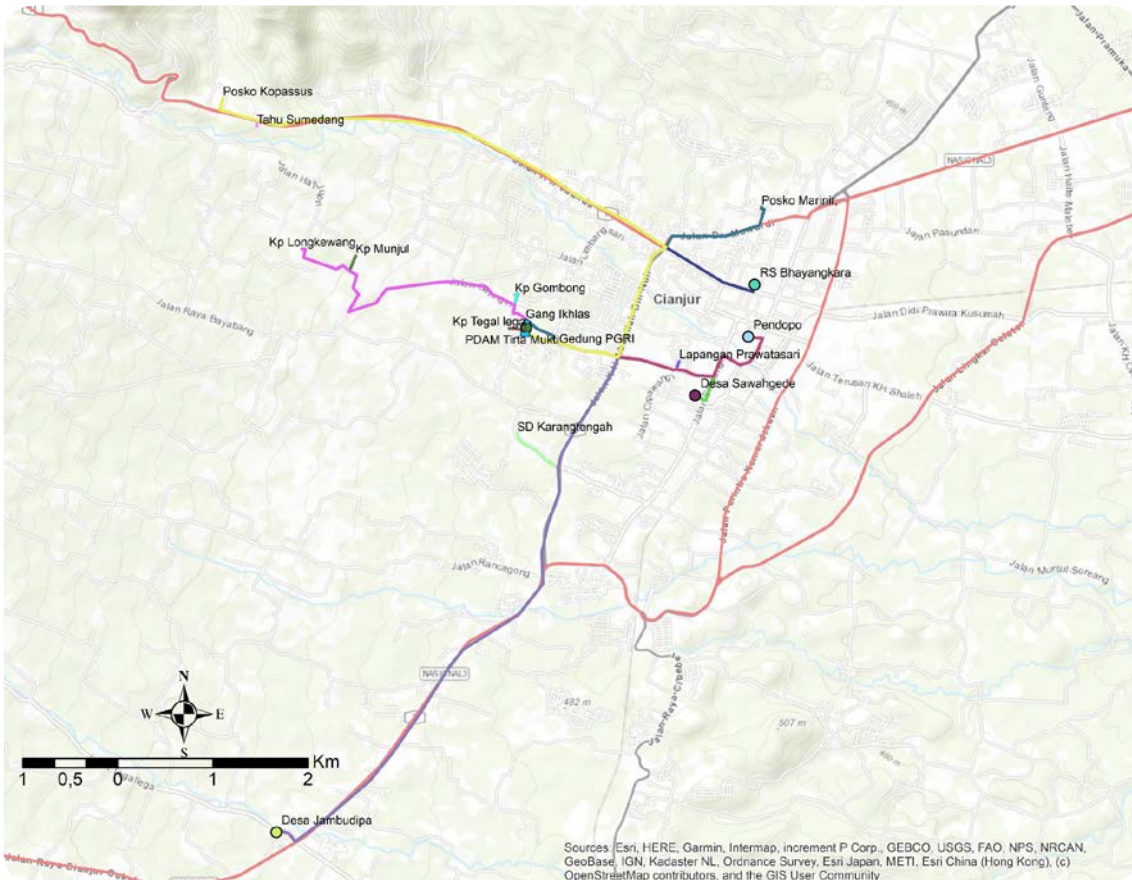
4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Yang Mendesak

Penanganan tanggap darurat Bencana Cianjur juga dilakukan dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti air minum, sanitasi sementara, dan tenda-tenda pengungsian. Tim Ditjen Cipta Karya dan BPPW Jawa Barat bekerja sama dengan *stakeholder* terkait secara sigap langsung mengerahkan total 57 unit alat dasar diantaranya 15 unit hidran umum, 14 unit toilet *portable*, 3 unit tenda besar, 10 unit tenda kecil, 6 unit mobil tangki air, dan 1 unit mobil toilet. Berbagai alat tersebut dikirimkan dari Depo Cipta Karya di Kota Bekasi. Selain itu, Ditjen Cipta Karya sendiri telah mengantisipasi potensi kebutuhan, oleh karenanya terdapat beberapa stok alat yang ada di PDAM Tirta Mukti Cianjur. Selain itu guna memudahkan penanganan, Tim tanggap darurat Ditjen Cipta Karya beserta BPPW mendirikan posko penanganan bencana Cianjur dengan menggunakan kantor PDAM Tirta Mukti Cianjur.

Pada awalnya distribusi berbagai alat tersebut tidak terkoordinasi dan termonitor akibat belum adanya SOP maupun kesatuan komando/koordinasi. Terdapat juga masyarakat yang meminta HU tidak melalui satu pintu sehingga menyulitkan monitoring dan identifikasi penentuan prioritas. Lantas guna merapikan administrasi pencatatan dan memudahkan monitoring, maka ditetapkan distribusi didasarkan pada identifikasi lapangan dan masyarakat yang mengajukan permohonan melalui satu pintu di Posko PDAM Tirta Mukti.

Para pengungsi juga dapat mengajukan permohonan alat ke posko tanggap darurat Kementerian PUPR yang nantinya dilakukan verifikasi oleh tim terkait kebutuhan di lokasi pengungsian. Berdasarkan data identifikasi lokasi titik pengungsian dan surat permohonan dari masyarakat, maka dilakukan kunjungan lapangan untuk memastikan alat dapat ditempatkan sesuai kriteria lokasi pengungsian serta terdapat saluran pembuangan yang layak. Jika tidak ada saluran pembuangan yang layak, maka masyarakat akan dipinjami biority dan secara swadaya menyediakan lubang di tanah untuk meletakkannya. Selain itu, kunjungan lapang juga dimaksudkan untuk memastikan akses menuju titik lokasi pengungsian guna mempermudah distribusi sumber daya PUPR.

Survei juga dilakukan untuk melihat apakah alat yang di lapangan masih diperlukan atau tidak. Jika sudah tidak digunakan, maka akan dialihkan ke lokasi lain yang membutuhkan atau ditarik ke PDAM Tirta Mukti. Adanya tambahan personil dari pegawai PDAM Tirta Mukti diperuntukkan untuk membantu pendistribusian air bersih yang bersumber dari air di PDAM dan diangkut menggunakan Mobil Tangki Air yang dijadwalkan dari pagi hingga sore hari setiap harinya. PDAM sendiri memiliki 10 mobil tangki air yang setiap 1 unit mobil tiap harinya dapat melakukan distribusi sebanyak 5 kali. Dukungan penuh PDAM Tirta Mukti terhadap proses ini didukung oleh arahan dari Bupati Cianjur. Selain PDAM, PMI juga melakukan distribusi dengan menggunakan 10 mobil.



Peta Akses Mobilisasi Logistik



Distribusi Hidran Umum dan Toilet Portable



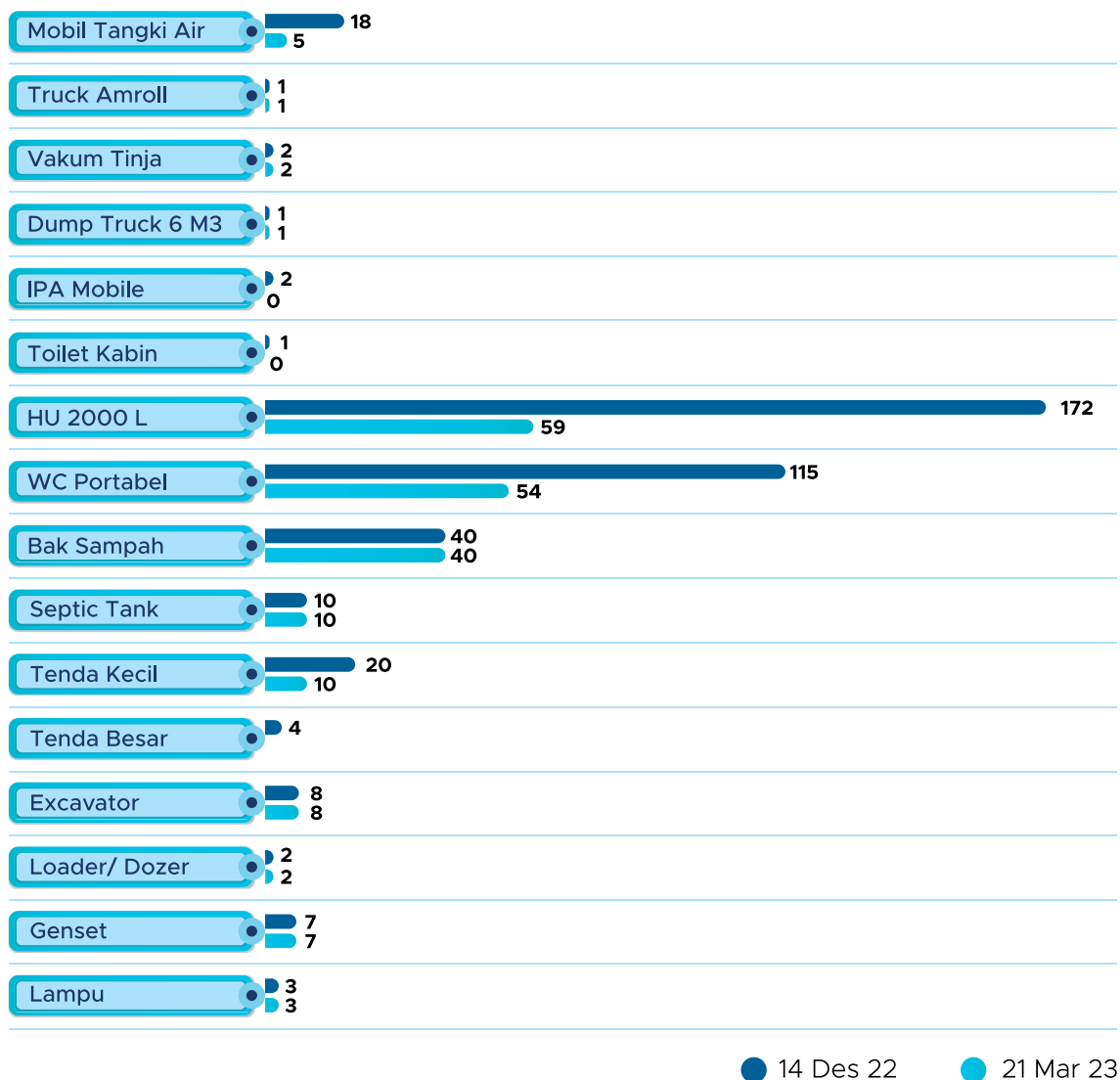
Distribusi Hidran Umum dan Toilet Portable

Salah satu alat yang vital adalah hidran umum kapasitas 200 liter yang digunakan untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat, tidak hanya di titik pengungsian namun juga area yang akses airnya terputus. Kementerian PUPR melalui BPPW Jawa Barat telah mendistribusikan hidran umum yang tertinggi mencapai sebanyak 172 unit di tanggal 18 Desember 2022. Pasca itu distribusi/penempatan HU mulai berkurang hingga mencapai 59 unit di tanggal 21 Maret 2022.

Untuk dapat berfungsi, hidran umum memerlukan kaki penyangga agar dapat berdiri. Jika kaki penyangga tersebut dirakit di PDAM Tirta Mukti, maka membutuhkan SDM lebih dan waktu yang lebih lama sebelum didistribusikan. Untuk mempercepat waktu distribusi dan optimalisasi sumber daya manusia, maka dikerahkan CPNS untuk membantu perakitan kaki HU.



Distribusi Hidran Umum dan Toilet Portable



Sebaran Sumber Daya PUPR tanggal 14 Desember 2022 dan 21 Maret 2023


Secara umum, puncak penyediaan Sumber Daya PUPR terjadi pada Tanggal 14 Desember 2022 yakni sebanyak 406 unit. Hingga tanggal 21 Maret 2023, jumlah sumber daya yang sudah dikembalikan ke Depo asal sebanyak 202 unit.



Salah satu alat yang vital adalah hidran umum kapasitas 200 liter yang digunakan untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat

PENANGANAN **GEMPA** CIANJUR

**REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
PASCA GEMPA:
MENGHIDUPKAN
KEMBALI ASA**

- 
- **Pembentukan SATGASLAK**
 - **Pemulihan Kembali Konektivitas: Memperlancar Upaya Penanganan**
 - **Perbaiki Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan Layanan Dasar Terjamin**
 - **Pemulihan Sarana Prasarana Umum: Membangkitkan Geliat Kehidupan Cianjur**
 - **Relokasi Permukiman di Zona Merah: Sebuah Langkah Mitigasi Strategis**
 - **Rekonstruksi Permukiman Warga Terdampak: Menjamin Ruang Aman bagi Tiap Keluarga**
 - **Penerjunan CPNS 2021: Momentum Pembekalan dan Pengalaman Generasi Muda**

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA: MENGHIDUPKAN KEMBALI ASA

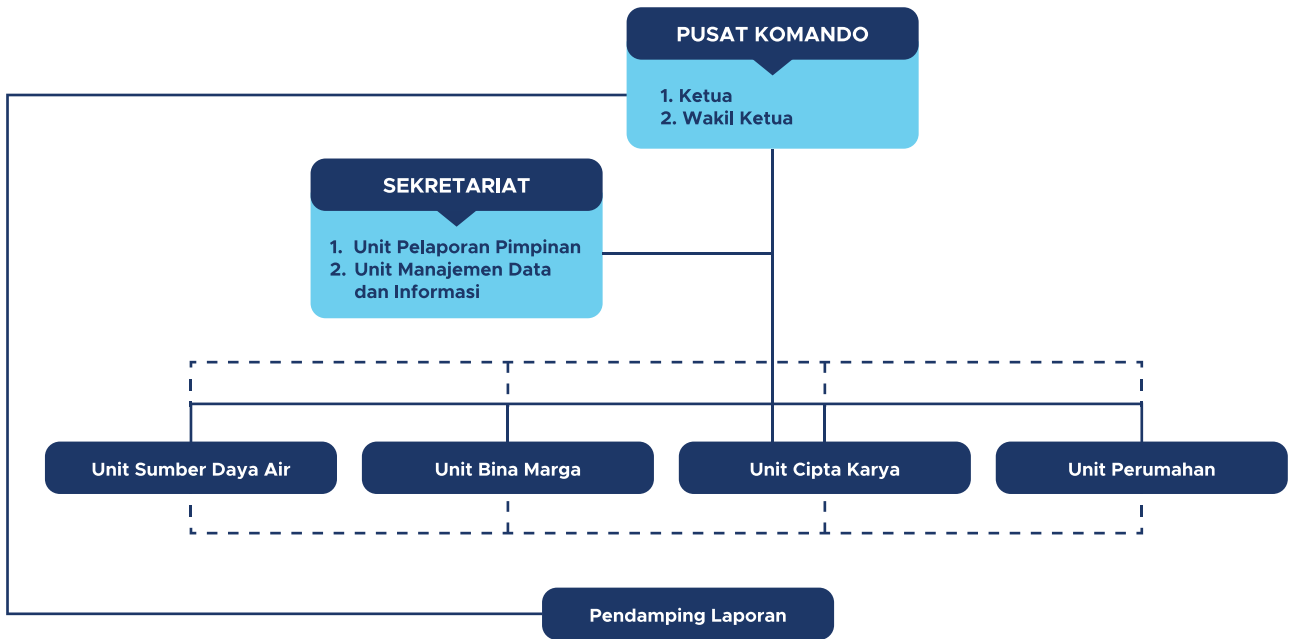
BAB

1. Pembentukan SATGASLAK

Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana, yang selanjutnya disingkat menjadi Satgaslak, merupakan upaya mengkonsolidasikan penanganan suatu bencana. Pada kasus bencana gempa bumi Cianjur, pembentukan Satgaslak dilakukan secepat mungkin agar penanganan tanggap darurat dapat terkoordinir di lapangan. Oleh karena itu, secara *de facto* Ketua Harian Satuan Tugas PBB Kementerian PUPR ditunjuk untuk memimpin koordinasi serta pengambilan keputusan yang dibutuhkan di lapangan. Selanjutnya secara paralel Kementerian PUPR segera mengesahkan pembentukan Satuan Tugas Pelaksana (Satgaslak) Penanganan Gempa Cianjur mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pembentukan Satgaslak ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 634/KPTS/Sj/2022 tentang Pembentukan Satgaslak Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Barat. Melalui SK ini maka Satgaslak Bencana Cianjur PUPR resmi terbentuk dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dan implementasi rencana penanganan pasca bencana. Adapun pelaksanaan tugas Satgas Bencana Cianjur PUPR ini berlangsung hingga masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan bencana dinyatakan berakhir atau pelaksanaan rekonstruksi permanen selesai.

Ketua Pusat Komando Satgas Bencana Cianjur PUPR adalah Ir. Achmad Gani Ghazaly Akman, M.Eng.Sc., dengan didampingi Wakil Ketua Iwan Suprijanto, S.T., M.T. Pada Unit Pelaksana diisi tim dari tiap unit organisasi yang bertugas sesuai tupoksinya, antara lain terdiri dari Unit Sumber Daya Air, Unit Bina Marga, Unit Cipta Karya, dan Unit Perumahan. Pada Sekretariat terdiri dari Unit Pelaporan Pimpinan yang dikoordinatori oleh Kepala Biro Komunikasi Publik serta Unit Manajemen Data dan Informasi dengan koordinator Kepala Pusat Data dan Teknologi



Bagan Struktur Satgaslak Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Barat



Kunjungan Kasatgas ke PDAM Tirta Mukti Cianjur



Kunjungan Kasatgas ke Lokasi Rencana Relokasi Huntap Sirnagalih

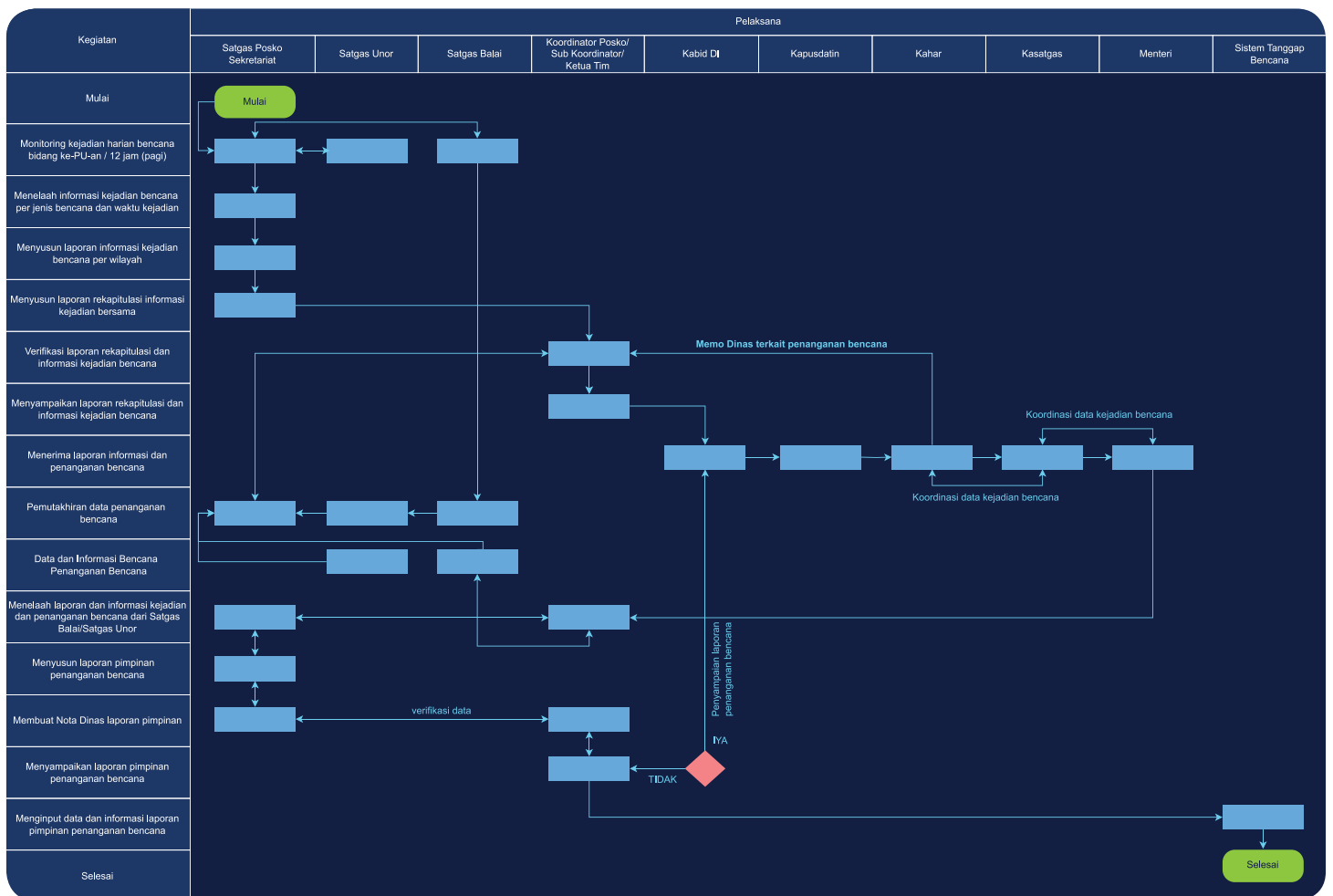


Rapat Koordinasi Satgas Bencana Cianjur Bersama Komisi V DPR RI



SK Sekretaris Jenderal Nomor 634/KPTS/Sj/2022 tentang Pembentukan Satgaslak Bencana Cianjur PUPR dalam butir ketujuh mengatur bahwa pelaksanaan penyampaian data dan informasi bencana dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Tanggap Bencana (SITABA), aplikasi Rumah Terdampak Bencana (RUTENA), dan *Dashboard* Informasi Penanganan Bencana Cianjur. Agar proses koordinasi Satgaslak berjalan secara efektif maka disusunlah SOP Mekanisme Penyusunan

Laporan Penanganan Bencana Posko Pelaporan sebagai bentuk standarisasi pola kerja dan komunikasi antar unsur Satgaslak. Keberadaan SOP ini penting demi terciptanya *single source of truth* yang *reliable*, *real time*, dan sesuai kondisi lapangan sehingga apabila dibutuhkan informasi oleh Pimpinan untuk pembuatan kebijakan/keputusan, maka data & informasi yang diberikan telah siap sedia.



SOP Penyusunan Laporan Penanganan Bencana Kementerian PUPR

Dalam menjalankan tugas koordinasi informasi dan pelaporan, dibentuk pula Posko Satgaslak Gempa Bumi Cianjur yang berlokasi di Kab. Cianjur guna memudahkan agenda koordinasi manakala dibutuhkan. Posko Satgaslak ini berbeda dengan Posko yang didirikan oleh Insinyur Muda maupun

yang berasal dari pihak Pemerintah Daerah. Posko Satgaslak dibentuk untuk koordinasi internal Satgaslak; meskipun tidak menutup pintu apabila nantinya masyarakat hendak menyampaikan aspirasi.



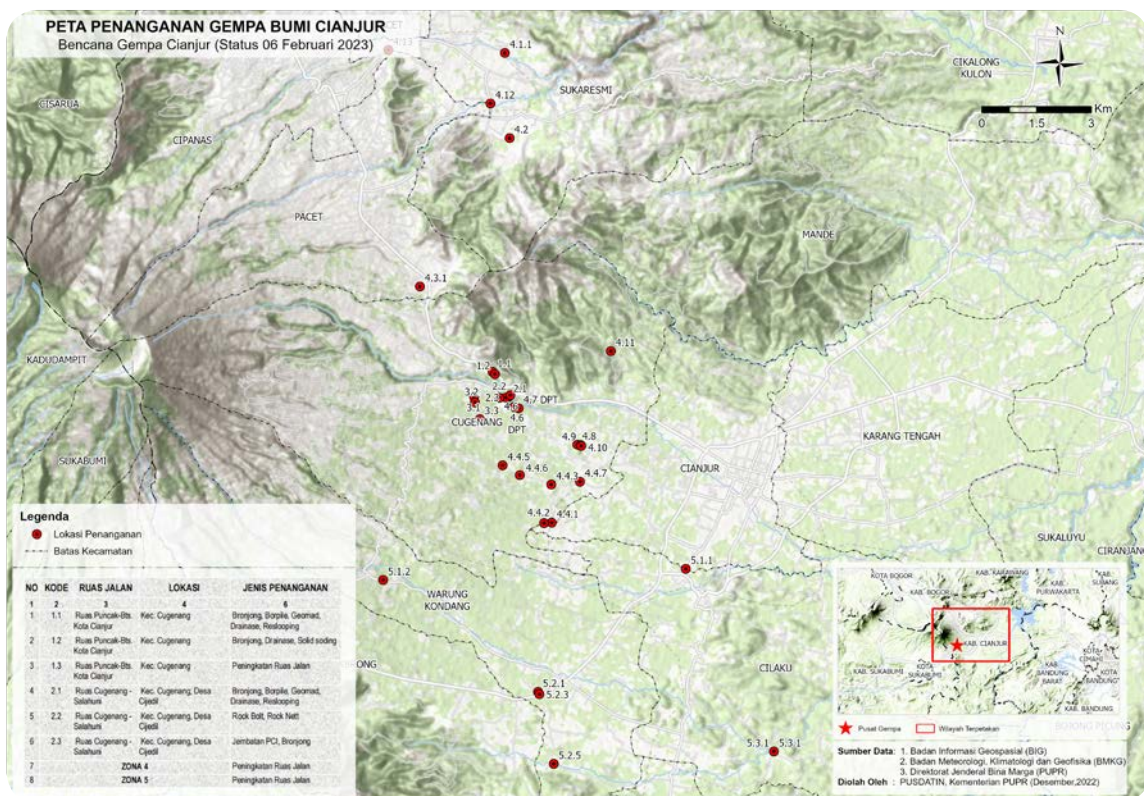
“Kementerian PUPR menerapkan pendekatan **Build Back Better**. Konstruksi pasca bencana dilakukan tidak hanya sekedar membangun kembali, namun membangun masyarakat yang tangguh bencana agar risiko bencana berkurang secara signifikan.”

2. Pemulihan Kembali Konektivitas: Memperlancar Upaya Penanganan

Gempa bumi Cianjur di tahun 2022 sempat menyebabkan putusnya akses jalan akibat tertimbun atau mengalami longsor seperti pada ruas Jalan Puncak - Batas Kota Cianjur. Infrastruktur jalan sangat penting bagi akses logistik tanggap darurat seperti penyaluran bantuan kepada masyarakat hingga mobilisasi alat berat yang diperlukan untuk penanganan bencana. Selain itu, dalam kesehariannya ruas utama Jalan Puncak - Batas Kota

Cianjur yang tertimbun longsor tersebut juga menjadi akses bagi masyarakat umum yang menghubungkan Kota Bogor dan Kab. Cianjur mengarah ke Kota Bandung.

Oleh karena itu pasca tanggap darurat dengan membuka jalur yang sempat terputus, upaya pemulihan akses jalan secara berkelanjutan dan menyeluruh dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) DKI Jakarta - Jabar. Pekerjaan penanganan dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Konsultan Manajemen Konstruksi PT Yodya Karya (Persero) dengan target penyelesaian selama 176 hari kalender.



Peta & Data Penanganan Ruas Jalan Terdampak

Penanganan dampak bencana di bidang Bina Marga dibagi menjadi 5 Zona di antaranya:

a. Zona 1: Ruas Jalan Puncak - Batas Kota Cianjur

Zona 1 merupakan ruas jalan utama yang digunakan untuk menuju Cianjur dari arah Puncak maupun sebaliknya dengan panjang ruas yang diperbaiki mencapai 900 meter jalan aspal, 160 meter lereng, dan 340 meter drainase. Zona ini merupakan lokasi di mana terjadinya longsor yang sempat menutup akses

jalan. Pada zona ini dilakukan beberapa kegiatan di antaranya:

- Pembersihan longsor dan jalan
- Pekerjaan Bronjong Lereng dan Sungai serta Akses Jalan Bronjong Sungai
- *Resloping* Lereng
- Pengecoran bahu jalan dan pengaspalan di beberapa titik
- Pemasangan *guard rail*.



Penanganan di Zona 1



Pasca Penanganan di Zona 1.1 (Status 3 Juli 2023)

b. Zona 2: Ruas Jalan Cugenang - Salahuni

Kegiatan penanganan di Zona 2 berada di Desa Cijedil Kecamatan Cugenang sepanjang 700 meter dan 33,9 meter jembatan meliputi:

- *Soil investigation*
- Pengecoran *bore pile*
- Pemasangan bronjong pada sisi sungai
- Perapihan longsoran batu dan penguatan lereng batu menggunakan *rock bolt* dan *rock netting*
- Pekerjaan reposisi pipa PDAM
- Perbaikan jembatan dan pemasangan bronjong sebagai pengaman *abutment* jembatan.



Penanganan di Zona 2 (Status 1 April 2023)

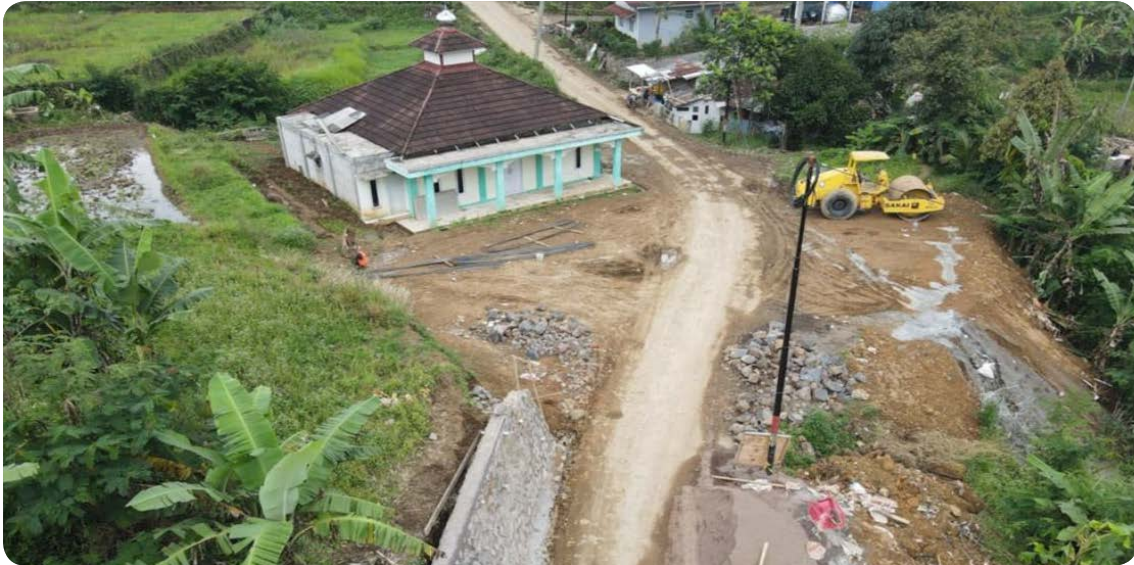


Kondisi Pasca Penanganan di Zona 2 (Status 3 Juli 2023)

c. Zona 3: Ruas Jalan Kuta - Benjot

Zona ini berada di Desa Sarampad Kecamatan Cugenang dengan total panjang ruas mencapai 126 meter jalan dan 30 meter drainase. Pada zona ini

dilakukan beberapa kegiatan seperti pekerjaan bronjong sungai, pemasangan dinding penahan tanah (DPT) samping jembatan, pekerjaan pengaspalan, dan perbaikan saluran drainase.



Penanganan di Zona 3 (Status 15 Februari 2023)



Kondisi Pasca Penanganan di Zona 3 (Status 3 Juli 2023)

d. Zona 4: Ruas Jalan Ciherang - Saronggae, Nagrak - Salahuni, dan Jembatan Panumbangan

Zona ini berada di Desa Suka Resmi Kecamatan Ciwalen dan Kecamatan Cugenang dengan panjang ruas mencapai 4.760 meter dan drainase

sepanjang 3.000 meter. Pada zona ini dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penanganan saluran drainase, *soil investigation* jembatan ciwalen, perbaikan serta penguatan DPT.



Pekerjaan DPT Zona 4 (Status 24 Desember 2022)

e. Zona 5: Ruas Jalan Cipadang - Bebedahan, Jembatan Kondang, Jembatan Muhara

Zona ini berada di Kp. Cijoho Kecamatan Warungkondang dan Kp. Lembur Tengah Desa Cisarandi Kecamatan

Ciwalen dengan panjang mencapai 1.021 meter. Pada zona ini dilakukan beberapa kegiatan di antaranya perbaikan dan penguatan DPT serta pengaspalan jalan.



Penanganan di Zona 5.1 (Status 3 Januari 2023)



Kondisi Pasca Penanganan di Zona 5.1 (Status 3 Juli 2023)

Selain itu tim BBWS Citarum bersama dengan Balai Teknik Sabo juga melakukan inspeksi survei pemetaan terhadap

potensi longsor di sepanjang Sungai Cianjur. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memitigasi potensi longsor serta banjir.



Tim BBWS Citarum bersama dengan Balai Teknik Sabo melaksanakan Survei Pemetaan terhadap potensi longsor di sepanjang Sungai Cianjur

3. Perbaiki Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan Layanan Dasar Terjamin

Dampak gempa juga berimbas pada infrastruktur air minum. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan terdapat 10 titik area kerusakan pipa SPAM yang tersebar

di beberapa desa di antaranya Desa Cirumput, Desa Talaga, Desa Cibulakan, Desa Cijedil, Desa Gasol, Desa Nagrak dan Desa Limbangan Sari.

Titik Koordinat Lokasi Kerusakan Jaringan Pipa Air

No	Koordinat	Alamat	Desa Terdampak	Kecamatan Terdampak	Keterangan	Dampak Terhadap Pelayanan
1	6°49'40.73" S 107° 4'17.46"E	Broncap Cirumput	Cirumput	Cugenang	Diperkirakan karena getaran gempa dua unit <i>gate valve</i> tertutup dan macet dan tidak bisa dibuka, penanganan sementara <i>gate/lidah valve</i> -nya di angkat	Aliran ke Daerah Pelayanan Desa Limbangan Sari, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Cianjur terhambat.
2	6°49'36.25" S 107° 5'4.83"E	Rancapicung	Munjul	Cugenang	Pipa steel diameter 150 mm dan pipa steel diameter 200 mm terbawa tanah longsor	
3	6°49'19.19" S 107° 6'3.63"E	Pertigaan Kp. Munjul	Munjul	Cugenang	Pipa <i>steel</i> 200 mm 3 titik dan 1 titik setelah jembatan pipa	
4	6°47'51.60" S 107° 4'54.13"E	Kp. Cijedil (Sate Sinta)	Cijedil	Cugenang	Pipa PVC diameter 315 mm terdampak longsor di ruas jalan nasional Kp. Cijedil Kec. Cugenang- Cianjur	
5	6°48'51.80" S 107° 6'5.84"E	Desa Gasol (SD Sukamaju)	Gasol	Cugenang	Jembatan pipa diameter 315 mm mengalami retak akibat gempa	
6	6°49'17.89" S 107° 6'5.85"E	Desa Cibulakan Kec. Cugenang	Cibulakan	Cugenang	Air pipa PVC diameter 300 mm meluap ke halaman jalan dan bahu jalan	
7	6°49'42.81" S 107° 6'57.39"E	Jl. Gatot Mangkupraja (Depan Toko)	Nagrak	Cianjur	Pipa ACP diameter 350 mm mengalami kebocoran. Air meluap ke halaman depan warga dan ke saluran air	

No	Koordinat	Alamat	Desa Terdampak	Kecamatan Terdampak	Keterangan	Dampak Terhadap Pelayanan
8	6°49'34.80" S 107° 6'59.61"E	Jl. Cikaret Girang (Pinggir sawah setelah peternakan kuda)	Limbangansari	Cianjur	Pipa ACP diameter 350 mm mengalami kebocoran. Air meluap badan jalan	
9	6°49'31.98" S 107° 7'1.06"E	Jl. Cikaret Girang	Limbangansari	Cianjur	Pipa ACP diameter 350 mm mengalami kebocoran. Air meluap ke halaman jalan dan bahu jalan	
10	6°49'29.05" S 107° 7'1.00"E	Jl. Cikaret Girang (Depan rumah Bu Onyas)	Limbangansari	Cianjur	Pipa ACP diameter 350 mm mengalami kebocoran. Air meluap ke halaman jalan dan bahu jalan	

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat (Status: 2 Desember 2022)



Kerusakan Pipa Air di Sawah Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang



Berbagai upaya perbaikan pipa air

Kementerian PUPR melaksanakan rehabilitasi di 5 titik SPAM yang tersebar di Kecamatan Cugenang, Cijedil, Cilaku, Mande dan Warung Kondang. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh kontraktor pelaksana Brantas Abipraya dan Konsultan Manajemen Konstruksi

Virama Karya. Rehabilitasi ini dilakukan untuk memastikan penyediaan air bersih dapat berjalan dengan lancar. Hingga pertengahan bulan September 2023, progres rehabilitasi telah mencapai rata-rata 98%.



Peta Sebaran Titik Rehabilitasi SPAM



Kementerian PUPR melaksanakan rehabilitasi di 5 titik SPAM yang tersebar di Kecamatan Cugenang, Cijedil, Cilaku, Mande dan Warung Kondang

Progres Rehabilitasi SPAM (Status 25 September 2023)

No	Nama	Kecamatan	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Manajemen Konstruksi	Progres M-39			Total Progres
					Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	
1	Rehabilitasi SPAM Cianjur yang bersumber dari Mata Air Cirumput	Cugenang	Brantas Abipraya	Virama Karya	100	98,55	-1,45	Rencana = 99,56% Realisasi = 94,45% Deviasi = -5,11%
2	Rehabilitasi SPAM Batalion Infanteri Raider 300	Cijedil	Brantas Abipraya	Virama Karya	100	96,6	-3,4	
3	Penyediaan SPAM Hunian Tetap – 1 Desa Sirnagalih	Cilaku	Brantas Abipraya	Virama Karya	98,02	78,21	-19,81	
4	Penyediaan SPAM Hunian Tetap – 2 Desa Murnisari	Mande	Brantas Abipraya	Virama Karya	97,11	80,88	-16,23	
5	Penyediaan SPAM Pondok Pesantren Darul Falah Jambudipa	Warung Kondang	Brantas Abipraya	Virama Karya	100	92,74	-7,26	
Progres Manajemen Konstruksi				Virama Karya				98,31%



Pekerjaan Genset di Ponpes Darul Falah



Pekerjaan Genset di Huntap 1 Desa Sirnagalih



Pembangunan Reservoir di Huntap 1 Desa Sirnagalih



Pembangunan Reservoir di Huntap 2 Desa Mande

Perbaikan juga dilakukan di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah tepatnya di TPA Pasir Sembung di Sirnagalih. Perbaikan dilakukan dengan pembuatan

dinding penahan tanah (DPT), pembesian dan pengecoran jalan inspeksi, pekerjaan gravel, hingga perbaikan Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL).

Progres Perbaikan TPA Pasir Sembung Sirnagalih (Status 25 September 2023)

No.	Nama	Kecamatan	Kontraktor Pelaksana	Konsultan	Progres Pelaksanaan			Total Progres (%)
					Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	
1	TPA Pasir Sembung	Cilaku	Brantas Abipraya	Yodya Karya	97,102	97,737	0,212	97,737
	Manajemen Konstruksi TPAS			Yodya Karya		95,446		



Pekerjaan Urugan Tanah



Pekerjaan IPL



Pekerjaan Tangga Inspeksi



Pekerjaan Bronjong



Perbaikan juga dilakukan di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah



4. Pemulihan Sarana Prasarana Umum: Membangkitkan Geliat Kehidupan Cianjur

Gempa Bumi Cianjur 2022 ini mengakibatkan kerusakan yang cukup masif, bukan hanya pada permukiman warga dan infrastruktur jalan, namun juga berbagai sarana prasarana umum seperti gedung pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga gedung perkantoran. Dampak yang luas dan berat ini disebabkan oleh faktor utama sebagai berikut:

- Kedalaman pusat gempa yang dangkal;
- Lokasi permukiman yang berada pada tanah lunak/lepas (efek tanah lunak) dan perbukitan (efek topografi);
- Struktur bangunan yang tidak memenuhi standar aman gempa.



Rumah Tembok Tanpa Besi Tulangan

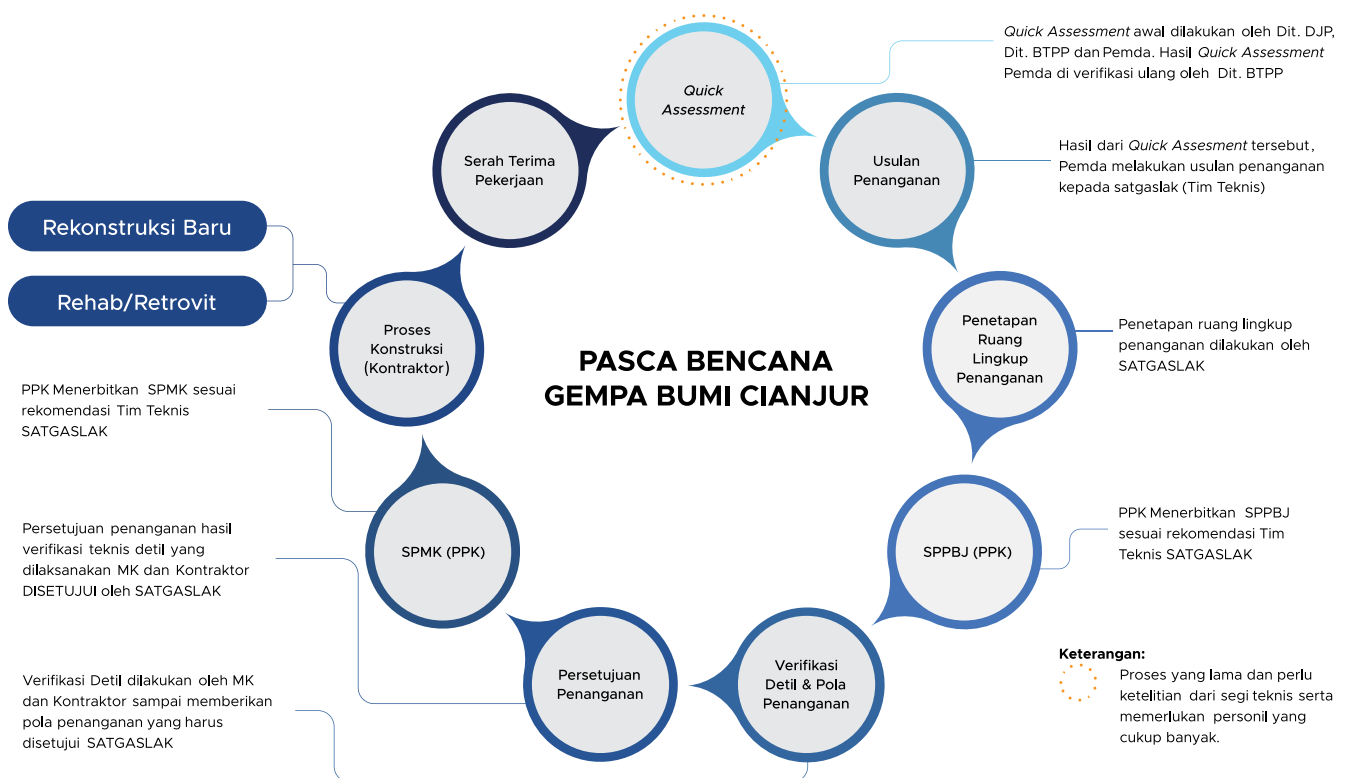


Struktur Kolom dan Balok Kuat Tetapi Dinding Lemah

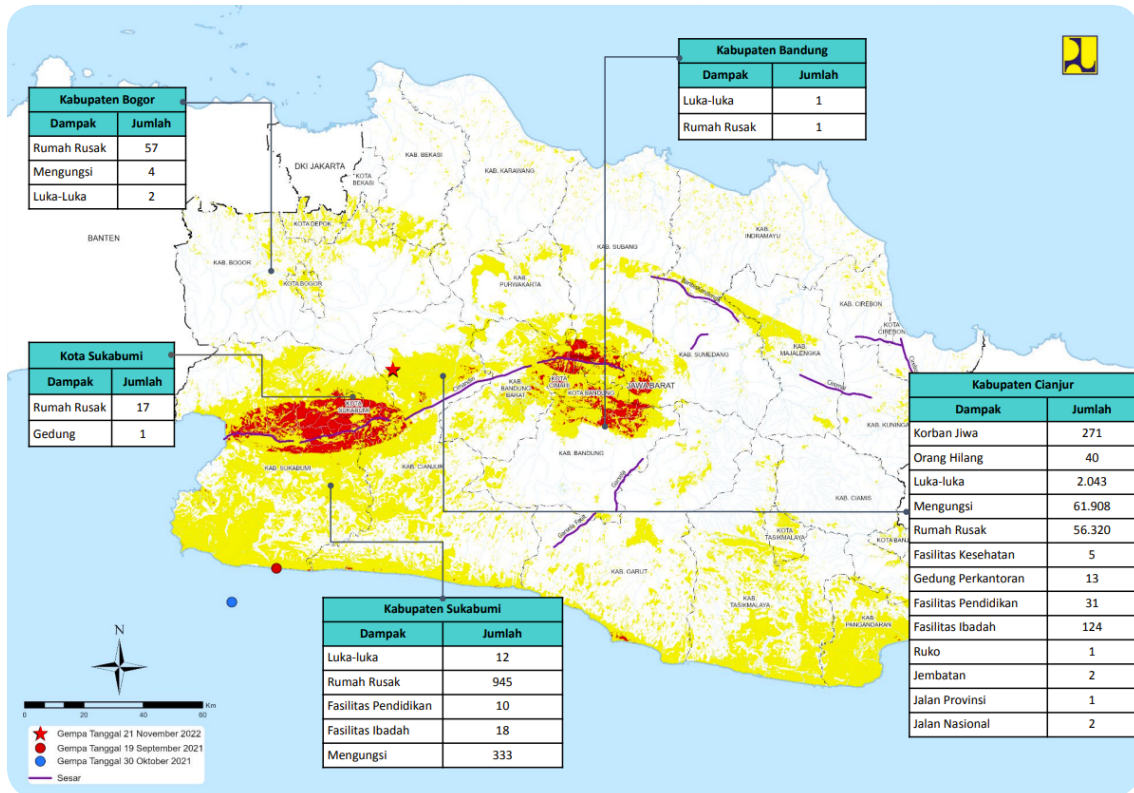
Kementerian PUPR sigap melakukan langkah-langkah strategis penanganan kerusakan bangunan yang diawali dengan *quick assessment* hingga memastikan

pekerjaan selesai sesuai rencana. Adapun matriks penanganan kerusakan bangunan terlihat pada ilustrasi di bawah ini.

MEKANISME PENANGANAN KERUSAKAN BANGUNAN DAMPAK GEMPA CIANJUR JAWA BARAT



Diawali dengan *quick assessment* hingga memastikan pekerjaan selesai sesuai rencana



Peta Sebaran Dampak Kerusakan Gempa Bumi Cianjur

Kementerian PUPR bersama dengan segenap *stakeholder* lain melakukan identifikasi infrastruktur yang terdampak gempa. Salah satu temuan menarik adalah bahwa usia bangunan tidak berkaitan dengan tingkat kerusakan. Artinya, bukan usia bangunanlah yang menentukan tingkat kerusakannya melainkan rutin tidaknya pemeliharaan. Bangunan

yang tidak atau jarang dilakukan pemeliharaannya yang terdampak berat meskipun secara usia masih tergolong baru. Sementara itu, meskipun sebenarnya Kabupaten Cianjur masuk dalam area koordinasi Satker Wilayah 1, namun dikarenakan luas dan masifnya kerusakan yang terjadi maka diputuskan Satker Wilayah 2 ikut membantu penanganan.



Bangunan yang tidak atau jarang dilakukan pemeliharaannya yang terdampak berat meskipun secara usia masih tergolong baru

Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana umum dilakukan dengan memprioritaskan fasilitas kesehatan, kemudian perkantoran dan fasilitas pendidikan. Fasilitas kesehatan diprioritaskan mengingat kebutuhan tinggi akan penanganan pasien dan korban akibat bencana gempa. Adapun dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa di masa mendatang, *safety factor* pada tahap rehab-rekon telah dinaikkan levelnya dari yang sebelumnya.

a. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan menjadi salah satu yang banyak mengalami kerusakan sehingga menyulitkan evakuasi korban yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Kerusakan paling parah terjadi di RSUD Sayang yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat gempa. Hasil identifikasi atas kerusakan pada fasilitas kesehatan menunjukkan data sebagai berikut:

Data Fasilitas Kesehatan Terdampak

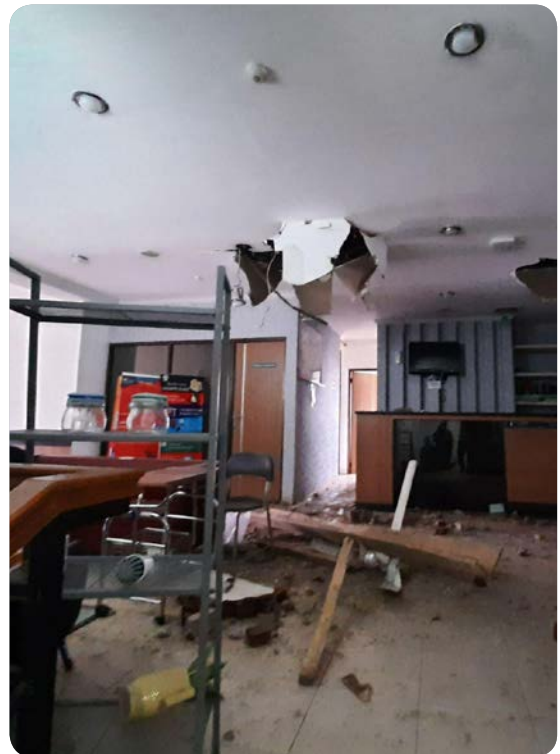
Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total
25	22	1	48

Sumber: Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Cipta Karya, tanggal 31 Desember 2022

Guna memastikan agar layanan kesehatan masyarakat dapat berfungsi kembali, Kementerian PUPR melakukan serangkaian langkah penanganan dengan

membangun dan memperbaiki kerusakan yang terjadi melalui penunjukan kepada BUMN atau kontraktor pelaksana sebagai berikut:

No	Nama Fasilitas Kesehatan	Kontraktor Pelaksana	Kontraktor Pengawas
1	RSUD Sayang	Brantas Abipraya	Virama Karya
2	Puskesmas Cijedil	Wika Gedung	Virama Karya
3	Puskesmas Pembantu Limbangansari	Brantas Abipraya	Virama Karya
4	Puskesmas Pembantu Nyalindung	Adhi Karya	Virama Karya



Kondisi Setelah Gempa



Kondisi Pasca Penanganan

Perbaikan dilakukan dengan optimal sesuai dengan semangat *“build back better”* sehingga fasilitas kesehatan tidak hanya kembali ke kondisi semula saja, namun dibangun lebih baik lagi agar penerapan dari peraturan Menteri Kesehatan juga semakin maksimal.

b. Fasilitas Perkantoran

Dampak yang luas gempa Cianjur pada 2022 yang lalu turut dialami oleh berbagai gedung perkantoran pemerintahan. Hasil identifikasi menunjukkan data kerusakan fasilitas perkantoran sebagai berikut.

Data Fasilitas Perkantoran Terdampak

Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total
141	68	53	262

Sumber: Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Cipta Karya, tanggal 31 Desember 2022



Proses Bekisting Kolom di Kantor Desa Babakankaret



Proses Penanganan di Lapis Cianjur

Guna memastikan agar aktivitas pemerintahan dapat berfungsi kembali, Kementerian PUPR melakukan serangkaian langkah penanganan dengan membangun dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pelaksana pembangunan dilakukan oleh beberapa kontraktor yang berbeda dengan tujuan proses pembangunan bisa berjalan dengan cepat, lebih efektif dan efisien. Adapun kontraktor yang ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan yaitu Brantas Abipraya, Waskita Karya,

Adhi Karya, dan Hutama Karya. Brantas Abipraya ditugaskan untuk menangani 10 gedung perkantoran, Waskita Karya menangani 5 gedung perkantoran, Adhi Karya menangani 22 gedung perkantoran, dan Hutama Karya menangani 3 gedung perkantoran. Selain itu, ada 2 kontraktor yang ditugaskan sebagai konsultan manajemen konstruksi yaitu Virama Karya yang menangani 33 gedung perkantoran dan Yodya Karya yang menangani 7 gedung perkantoran.



Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pasca Penanganan



Kantor Desa Wangunjaya Pasca Penanganan

c. Fasilitas Pendidikan

Hasil assessment atas kerusakan pada fasilitas pendidikan menunjukkan dampak yang cukup parah. Tim Direktorat Jenderal Cipta Karya menemukan total 632 unit sekolah mengalami kerusakan sebagaimana tercermin dalam tabel di bawah ini:

Satgas Cianjur melakukan *overlay* guna mengetahui sebaran sekolah yang mengalami kerusakan guna memudahkan penyusunan langkah untuk mobilisasi sumber daya dan penentuan prioritas penanganan bersama dengan infrastruktur lain yang membutuhkan perhatian.

Data Sekolah Terdampak

No.	Jenjang	Rusak Ringan	Rusak	Rusak Berat	Total
1.	PAUD/TK/RA	34	22	57	113
2.	SD/MI	107	41	165	313
3.	SMP/MTS	43	25	29	97
4.	SMA/SMK/MA	54	23	32	109

Sumber: Direktorat Prasarana Strategis Cipta Karya, Status 6 Januari 2023



Peta Sebaran Sekolah yang Mendapat Penanganan

Beberapa Dampak Kerusakan di Fasilitas Pendidikan



SD Negeri Kebonjeruk Cilaku



SD Negeri Sukamaju 1 Cugenang



SD Negeri Gasol



SD Negeri Karang Tengah

Salah satu temuan menarik adalah terdapat 2 sekolah yang tidak mengalami kerusakan fatal akibat gempa, yaitu SDN Cibantala 1 dan SDN Kidang Kencana. Hal tersebut dikarenakan dalam pembangunan kedua sekolah tersebut

sudah menerapkan teknologi konstruksi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) atau bangunan tahan gempa pada saat direhabilitasi dan direnovasi oleh Kementerian PUPR pada tahun 2020.



Kondisi SDN Kidang Kencana Pasca Gempa



Kondisi SDN Cibantala 1 Pasca Gempa

Dari keseluruhan fasilitas pendidikan yang terdampak, tidak semua perbaikan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Jumlah sekolah yang mendapatkan penanganan dari Kementerian PUPR. Sejumlah 215 unit sekolah pendidikan dilakukan oleh kontraktor yang telah ditunjuk secara langsung dan pelaksanaannya diawasi oleh Direktorat Prasarana Strategis Kementerian PUPR.

Penanganan prasarana pendidikan dilakukan dengan pembagian wilayah kerja menjadi 2 wilayah di mana untuk sekolah di Wilayah 1 sebanyak 80 sekolah dan Wilayah 2 sebanyak 135 sekolah. Untuk detail pembagiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Penanganan Sekolah Terdampak per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah yang Diperbaiki	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Pengawas	Keterangan
1	Cilaku	19	Brantas Abipraya	Yodya Karya	Wilayah 1
2	Warungkondang	16	Brantas Abipraya	Yodya Karya	
3	Gekbrong	20	Hutama Karya	Yodya Karya	
4	Mande	8	Hutama Karya	Yodya Karya	
5	Karangtengah	17	Hutama Karya	Yodya Karya	
6	Cugenang 1	50	Wika Gedung	Virama Karya	Wilayah 2
7	Cugenang 2	47	Adhi Karya	Virama Karya	
8	Cianjur	38	Waskita Karya	Virama Karya	
Total		215			



Sekolah yang mendapatkan penanganan dari Kementerian PUPR Sejumlah 215 unit sekolah

Sebagian besar rehabilitasi-rekonstruksi fasilitas pendidikan telah selesai. Rehab-rekon dilakukan dengan mengadopsi metode RISHA agar ke depan bangunan sekolah lebih tahan bencana terutama gempa (*disaster resilience*). Berdasarkan catatan, terdapat beberapa kendala yang kerap terjadi dalam pelaksanaannya,

meliputi kurangnya tenaga kerja di lapangan, terlambatnya penyampaian dokumen MC-100 dan dokumen pelaksanaan proyek serta pengajuan gambar perencanaan dilakukan secara parsial sehingga efektivitas pengecekan dan pengawasan di lapangan kurang maksimal.



Perbaikan SD Negeri Kebonjeruk Cilaku



Perbaikan SD Negeri Sukamaju 1 Cugenang



Perbaikan SMP IT As-Syauqie



Perbaikan SD Negeri Kembang Manis 1



Dengan mengadopsi metode RISHA agar ke depan bangunan sekolah lebih tahan bencana terutama gempa (*disaster resilience*)



d. Fasilitas Peribadatan

Dampak yang terjadi pada fasilitas peribadatan yang ada di wilayah Cianjur juga cukup parah. Khususnya fasilitas peribadatan yang terdapat

di Kecamatan Cugenang, terdapat 3 masjid yang mengalami kerusakan dan mendapatkan penanganan dari Kementerian PUPR di antaranya:

Fasilitas Peribadatan yang Mendapat Penanganan Kementerian PUPR

No	Nama Fasilitas Peribadatan	Kontraktor Pelaksana	Kontraktor Pengawas
1	Masjid Subulun Najat	Wika Gedung	Virama Karya
2	Masjid Attaqwa	Wika Gedung	Virama Karya
3	Masjid Jami' Sindang Kasih	Wika Gedung	Virama Karya



Kondisi Masjid Subulunnajat Pasca Terjadi Gempa Bumi



Hasil Perbaikan di Masjid Subulunnajat Pasca Penanganan

5. Relokasi Permukiman di Zona Merah: Sebuah Langkah Mitigasi Strategis

Seperti diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa dari kesepakatan lintas instansi ditetapkan area-area yang merupakan zona merah gempa Cianjur. Namun pada beberapa area dalam zona merah tersebut sebelumnya banyak digunakan bermukim oleh masyarakat yang sedari awal tidak tahu akan adanya potensi bahaya gempa yang mengintai. Dalam rangka langkah mitigasi jangka panjang, diputuskan bahwa permukiman di zona merah harus direlokasi ke area yang lebih aman.

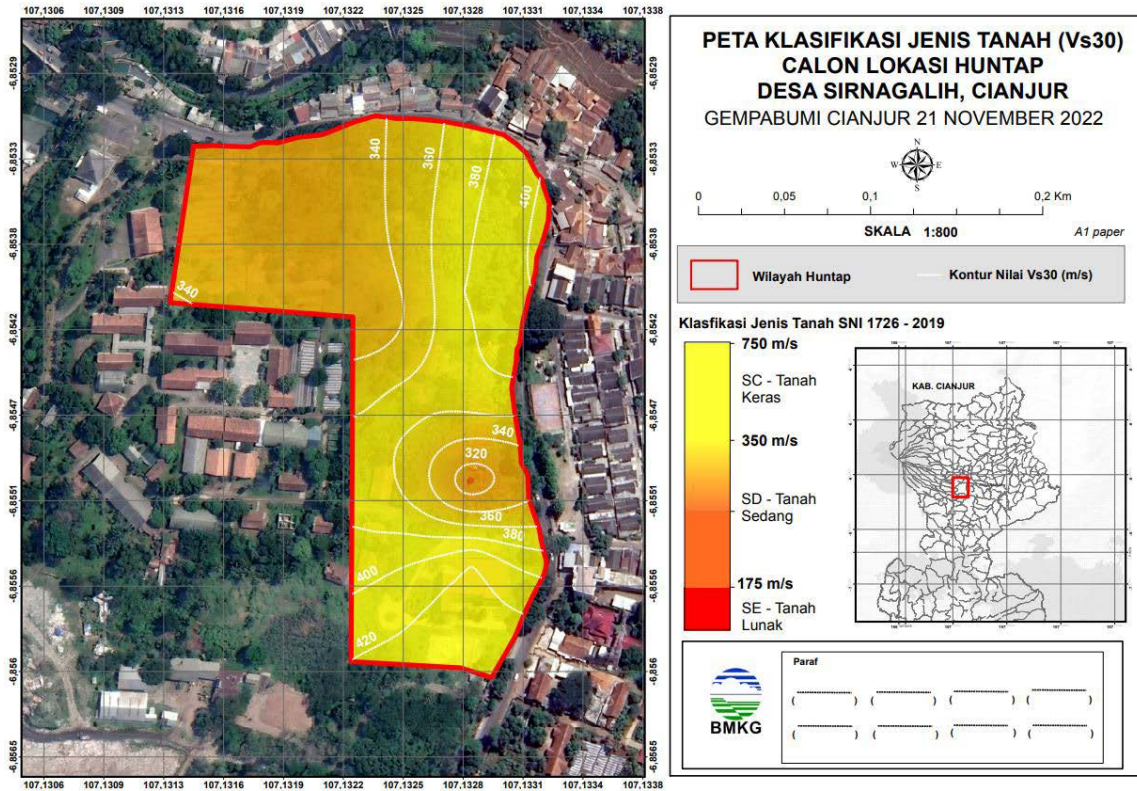
Kementerian PUPR bersama dengan segenap *stakeholder* kemudian melakukan studi kelayakan untuk mencari lokasi relokasi dengan mempertimbangkan skenario antisipasi gempa M 5,6 (Skenario 1) dan skenario antisipasi gempa di patahan Cimandiri Segmen Rajamandala (Skenario 2). Pertimbangan lain dalam menetapkan kesesuaian lahan adalah status topografi dan geologi yang aman, zona aman gempa/geser, kesesuaian tata ruang, status tanah yang legal, dan dapat segera diterbitkan SK Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Pemda.



Zona merah tersebut sebelumnya banyak digunakan bermukim oleh masyarakat

Beberapa kandidat lokasi yang diusulkan menjadi tempat relokasi di antaranya adalah Desa Sirnagalih, Desa Murnisari, Desa Cipendawa, Desa Mulyasari dan Jamali. Berikut beberapa hasil identifikasi beserta butir-butir yang menjadi pertimbangan kelayakan/ketidaklayakan.

Calon Hunian Tetap (Huntap) Sirnagalih



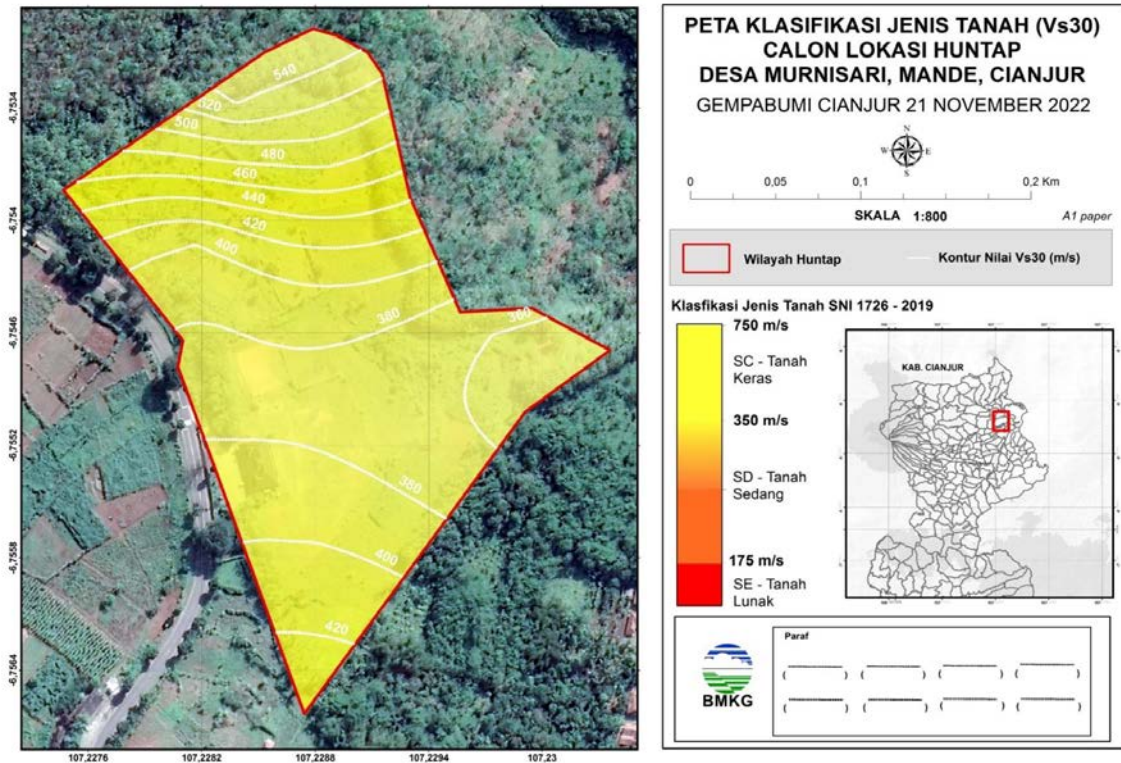
Dengan mempertimbangkan Skenario 1, diperoleh rekomendasi cukup layak sebagai hunian dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Hasil pengukuran klasifikasi jenis tanahnya adalah sebagai berikut:

- Luas rencana relokasi 2,4 hektar;
- Kondisi tanah cenderung datar dan sedikit landai dengan kemiringan $\pm 5\%$;
- Secara umum lokasi calon huntap memiliki jenis tanah keras (SC) dengan nilai 320-420 m/s;
- Jarak lurus dari episenter ke lokasi rencana ± 8 km;
- Perkiraan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PGA) di permukaan 260 gals.
- Intensitas guncangan mencapai IV-V MMI (tingkat guncangan ringan sampai sedang).

Dengan mempertimbangkan Skenario 2, diperoleh rekomendasi layak sebagai hunian dengan konstruksi bangunan tahan gempa bumi. Berikut adalah hasil pengukuran klasifikasi jenis tanah calon huntap Sirnagalih:

- Jarak lurus dari episenter ke lokasi rencana ± 7 km. Jarak tegak lurus ke jurus patahan $\pm 11,5$ km;
- Luas rencana relokasi 2,4 hektar;
- Kondisi tanah cenderung datar dan sedikit landai dengan kemiringan $\pm 5\%$;
- Secara umum lokasi Calon Huntap memiliki jenis Tanah Keras (SC) dengan nilai 320-420 m/s;
- Perkiraan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PGA) di permukaan 417 gal.

Calon Hunian Tetap (Huntap) Murnisari



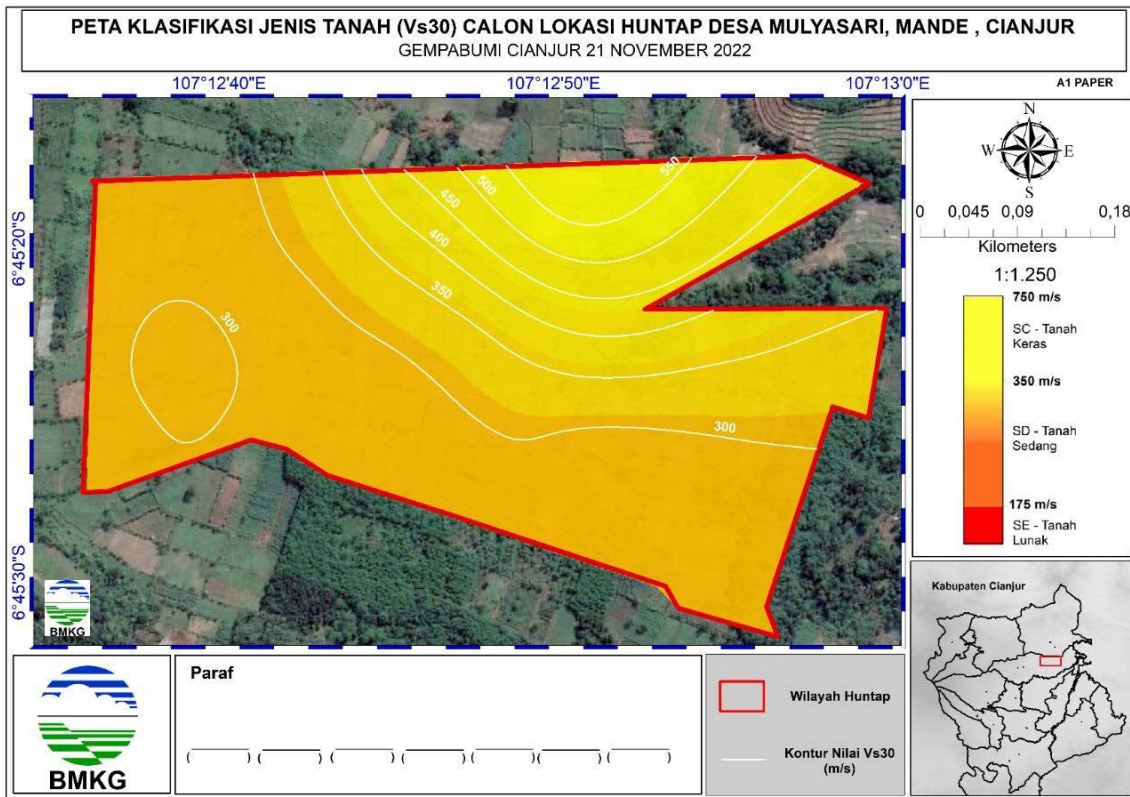
Dengan mempertimbangkan Skenario 1, diperoleh rekomendasi layak sebagai hunian dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Hasil pengukuran klasifikasi jenis tanahnya adalah sebagai berikut:

- Luas rencana relokasi 5 hektar;
- Kondisi tanah cenderung datar dan sedikit landai dengan kemiringan $\pm 5\%$;
- Secara umum lokasi Calon Huntap memiliki jenis Tanah Keras (SC) dengan nilai 360-540 m/s;
- Jarak lurus dari episenter ke lokasi rencana ± 20 km;
- Perkiraan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PGA) di permukaan 111 gals;
- Intensitas guncangan mencapai III-IV MMI ('lemah s/d ringan').

Dengan mempertimbangkan Skenario 2, diperoleh rekomendasi layak sebagai hunian dengan konstruksi bangunan tahan gempa bumi. Berikut adalah hasil pengukuran klasifikasi jenis tanah calon huntap Murnisari:

- Jarak lurus dari episenter ke lokasi rencana ± 20 km. Jarak tegak lurus ke jurus patahan $\pm 11,5$ km;
- Luas rencana relokasi 5 hektar;
- Kondisi tanah cenderung datar dan sedikit landai dengan kemiringan $\pm 5\%$;
- Secara umum lokasi Calon Huntap memiliki jenis Tanah Keras (SC) dengan nilai 360-540 m/s;
- Perkiraan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PGA) di permukaan 385 gals.

Calon Hunian Tetap (Huntap) Mulyasari dan Jamali



Dengan mempertimbangkan Skenario 1, diperoleh rekomendasi layak sebagai hunian dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Hasil pengukuran klasifikasi jenis tanahnya adalah sebagai berikut:

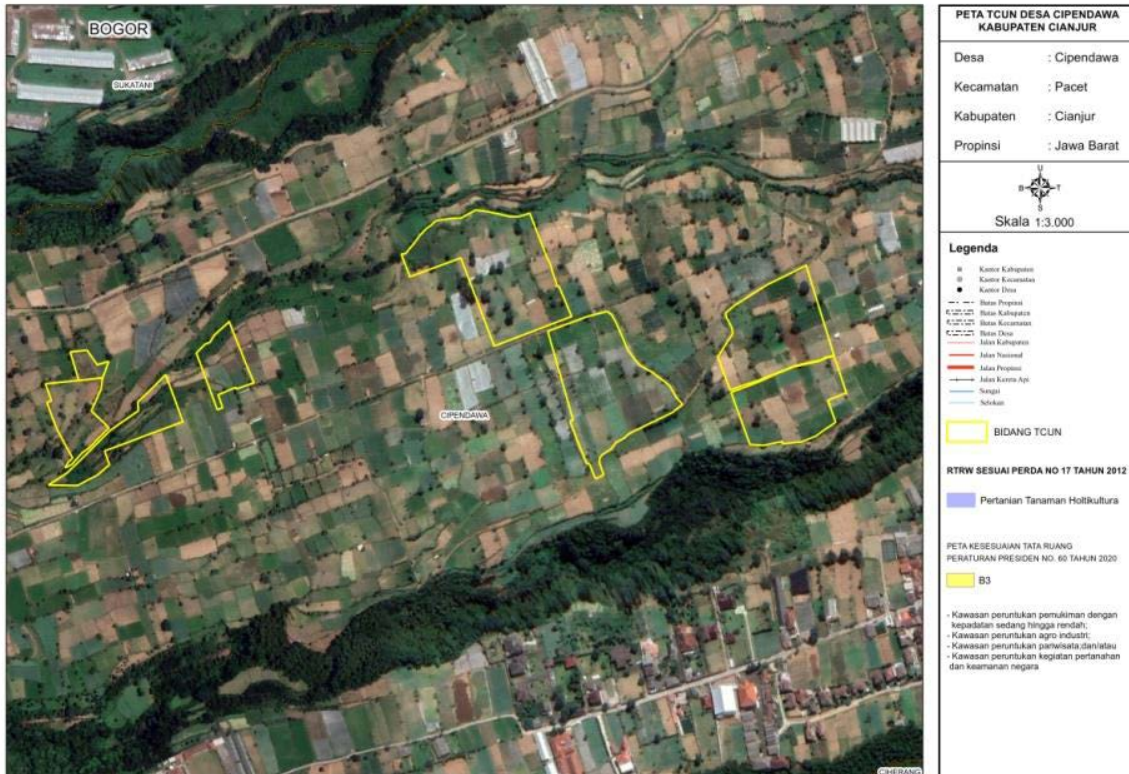
- Luas calon Huntap relokasi 50 hektar, berada di perbatasan dua desa, yaitu Mulyasari dan Jamali;
- Kondisi tanah dengan kontur berbukit dan lereng dengan kemiringan $\pm 15^\circ$;
- Secara umum lokasi Calon Huntap memiliki jenis Tanah Sedang (SD) hingga Keras (SC) dengan nilai 265-570 m/s;
- Jarak lurus dari episenter gempa Cianjur ke lokasi rencana ± 19 km;
- Perkiraan Nilai Percepatan Maksimum (PGA) di permukaan 120 gals.

Dengan mempertimbangkan Skenario 2, diperoleh rekomendasi layak sebagai hunian dengan konstruksi bangunan

tahan gempa bumi. Berikut adalah hasil pengukuran klasifikasi jenis tanah calon huntap Mulyasari dan Jamali:

- Luas calon Huntap relokasi 50 hektar, berada di perbatasan dua desa, yaitu Mulyasari dan Jamali.
- Kondisi tanah dengan kontur berbukit dan lereng kemiringan $\pm 15^\circ$.
- Secara umum lokasi Calon Huntap memiliki jenis Tanah Sedang (SD) hingga Keras (SC) dengan nilai 265-570 m/s.
- Jarak lurus dari episenter Segmen Rajamandala ke lokasi rencana ± 20 km.
- Perkiraan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PGA) di permukaan 120 gals.

Calon Hunian Tetap (Huntap) Cipendawa



Dengan mempertimbangkan Skenario 1, diperoleh rekomendasi kondisi tanah tidak layak untuk konstruksi bangunan. Hasil pengukuran klasifikasi jenis tanahnya adalah sebagai berikut:

- Luas rencana relokasi 10 hektar terbagi dalam 6 bidang;
- Kondisi lahan berupa lereng/terasering aluvial Gunung Gede;
- Perkiraan jarak dari puncak kawah Gunung gede ± 5 km (masuk Kawasan Rawan Gunung Api);
- Jarak lokasi rencana Huntap ke episenter ± 8 km;
- Hasil pengukuran Vs30 (MASW) klasifikasi jenis Tanah Sedang (D), dengan nilai Vs30 187 m/s;
- Perkiraan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PGA) di permukaan 230 gals;
- Intensitas guncangan mencapai VII MMI.

Dengan mempertimbangkan Skenario 2, diperoleh rekomendasi kondisi tanah cukup layak untuk konstruksi bangunan tahan gempa namun perlu konsultasi dengan PVMBG terkait bahaya gunung api. Berikut adalah hasil pengukuran klasifikasi jenis tanah calon huntap Cipendawa:

- Jarak lurus dari episenter ke lokasi rencana $\pm 29,7$ km. Jarak ke jurus patahan $\pm 29,7$ km;
- Luas rencana relokasi 10 hektar terbagi dalam 6 bidang;
- Kondisi lahan berupa lereng/terasering aluvial Gunung Gede;
- Perkiraan jarak dari puncak kawah Gunung Gede ± 5 km (masuk Kawasan Rawan Gunung Api);
- Hasil pengukuran Vs30 (MASW) klasifikasi jenis Tanah Sedang (D), dengan nilai Vs30 187 m/s;
- Perkiraan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PGA) di permukaan 188 gals.

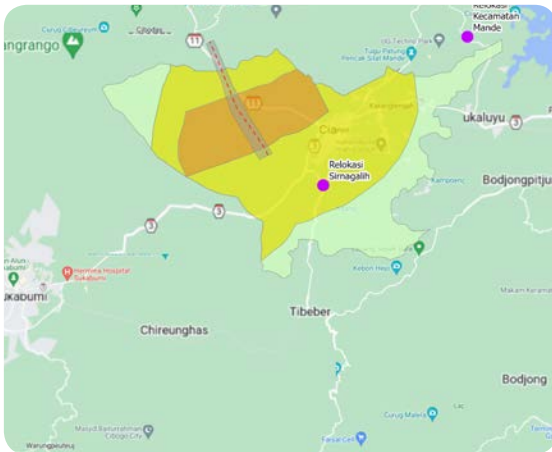
Hasil Studi Kelayakan Lokasi Potensial untuk Relokasi

Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka diputuskan lokasi relokasi huntap tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan di Desa Sirnagalih dan Desa Mande.

Tahap 1 pembangunan huntap dimulai pada tanggal 1 Desember 2022 di Desa Sirnagalih dan telah selesai dengan ditandai dengan serah terima pada tanggal 1 Maret 2023. Kontraktor dalam pembangunan huntap ini adalah PT Brantas Abipraya (Persero). Fasilitas umum yang tersedia di area ini berupa balai RW, taman bermain, dan reservoir.

Jumlah penerima hunian sebanyak 200 KK berdasarkan SK Bupati Cianjur No. 360/KEP.52-DPKP/2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Nagrak 125 KK
- Desa Mangunkerta 28 KK
- Desa Cijedil 1 KK
- Desa Benjot 17 KK
- Desa Sarampad 29 KK



Peta Usulan Lokasi Relokasi

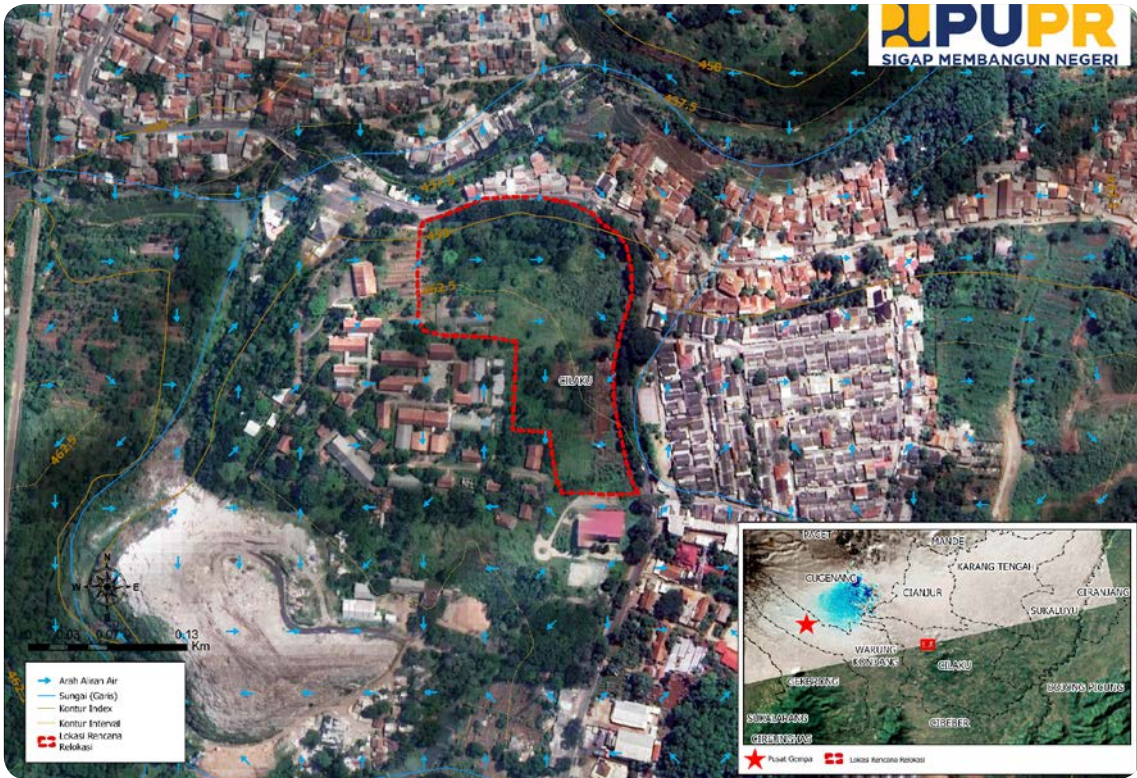


Penyiapan Lokasi Pembangunan Huntap di Desa Sirnagalih

Jumlah penerima hunian sebanyak 200 KK berdasarkan SK Bupati Cianjur No. 360/KEP.52-DPKP/2023



Inspeksi Lapangan Lokasi Huntap di Desa Sirnagalih



Peta Rencana Lokasi Relokasi Sinargalih



Site Plan Lokasi Relokasi Sinargalih



Kunjungan Presiden RI ke Lokasi Huntap Desa Sirnagalih





Kunjungan Ketua DPR RI dan Penyerahan Simbolis Rumah Hunian Tetap di Sirnagalih



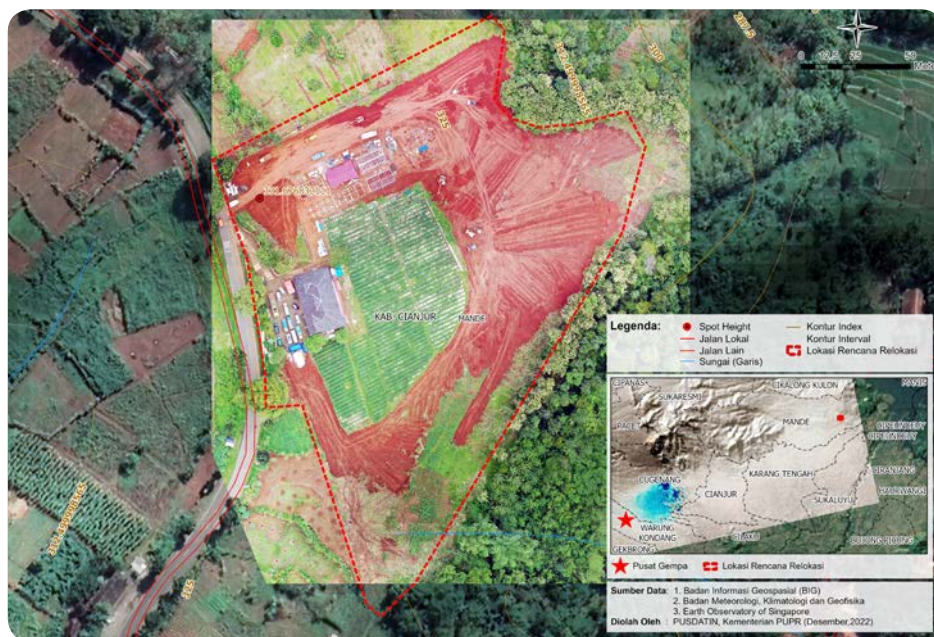
Hasil Pembangunan Relokasi Sirnagalih

Tahap 2 pembangunan huntap di Desa Mande dimulai pada tanggal 27 Desember 2022 dan telah selesai pada tanggal 20 Juni 2023. Kontraktor dalam pembangunan huntap ini adalah PT Brantas Abipraya (Persero). Dari 4 hektar lahan di sekitar Kantor Kecamatan Mande, Desa Murnisari yang telah disetujui pihak Kantor Pertanahan dan telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Desember 2022, hanya 1,9 hektar yang digunakan untuk pembangunan huntap

dikarenakan 1,1 hektar lahan terlalu curam. Jumlah penerima hunian sebanyak 151 KK berdasarkan SK Bupati Cianjur **No. 360/ KEP.111-DISPERKIM/2023** dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Sarampad 70 KK
- Desa Mangunkerta 6 KK
- Desa Gasol 2 KK
- Desa Cibulakan 57 KK
- Desa Benjot 3 KK
- Desa Cijedil 13 KK

Site Plan Lokasi Relokasi Mande



Peta Lokasi Relokasi Mande



Hasil Pembangunan Relokasi Mande

6. Rekonstruksi Permukiman Warga Terdampak: Menjamin Ruang Aman bagi Tiap Keluarga

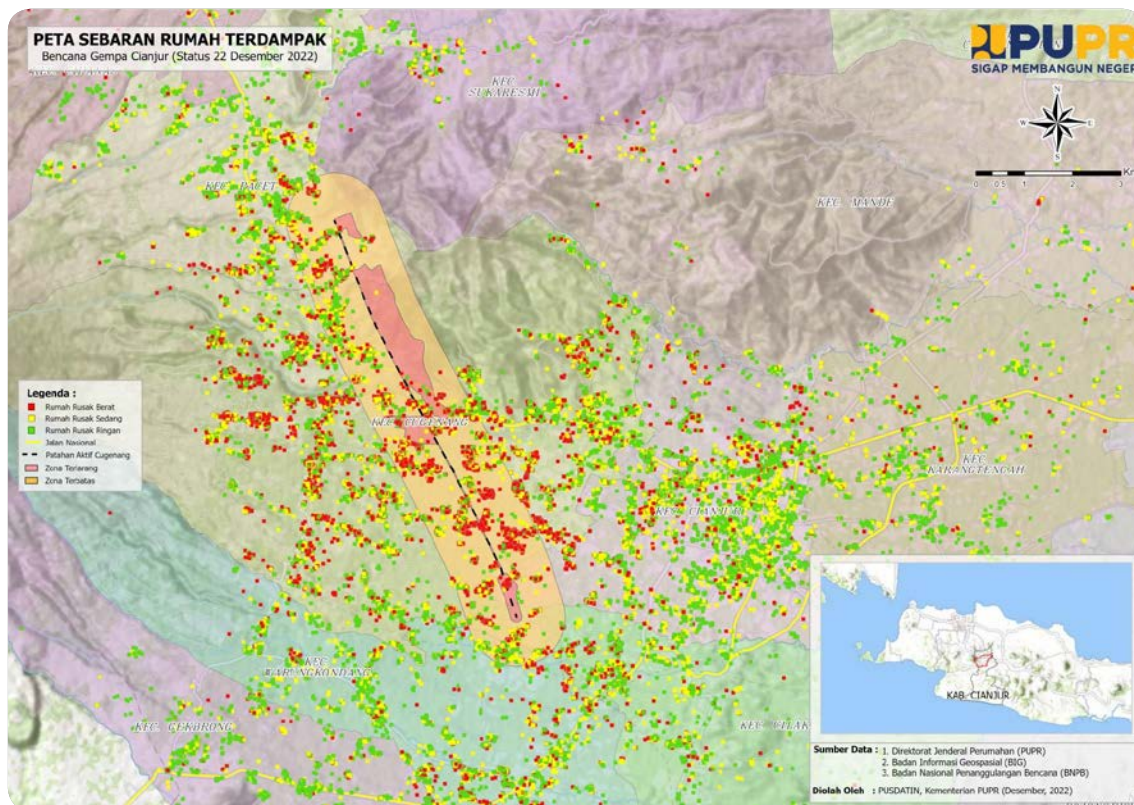
Hasil asesmen di lapangan menunjukkan rumah yang terdampak rata-rata adalah yang tidak memiliki struktur bangunan yang terstandar. Sama dengan bangunan gedung lainnya, bahwa ternyata usia bangunan tidak berkaitan dengan ketahanannya terhadap gempa, melainkan rutin tidaknya pemeliharaan

serta diterapkan tidaknya struktur anti gempa. Pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi RUTENA yang dikelola oleh Ditjen Perumahan. Berikut data kerusakan rumah hasil identifikasi Ditjen Perumahan bersama Tim Reaksi Cepat (TRC).

Data Kerusakan Rumah

Kategori Rusak	Jumlah
Rumah Rusak Ringan	22.124
Rumah Rusak Sedang	13.070
Rumah Rusak Berat	27.434
Jumlah	62.628

Sumber: Ditjen Perumahan (Status 27 November 2022)

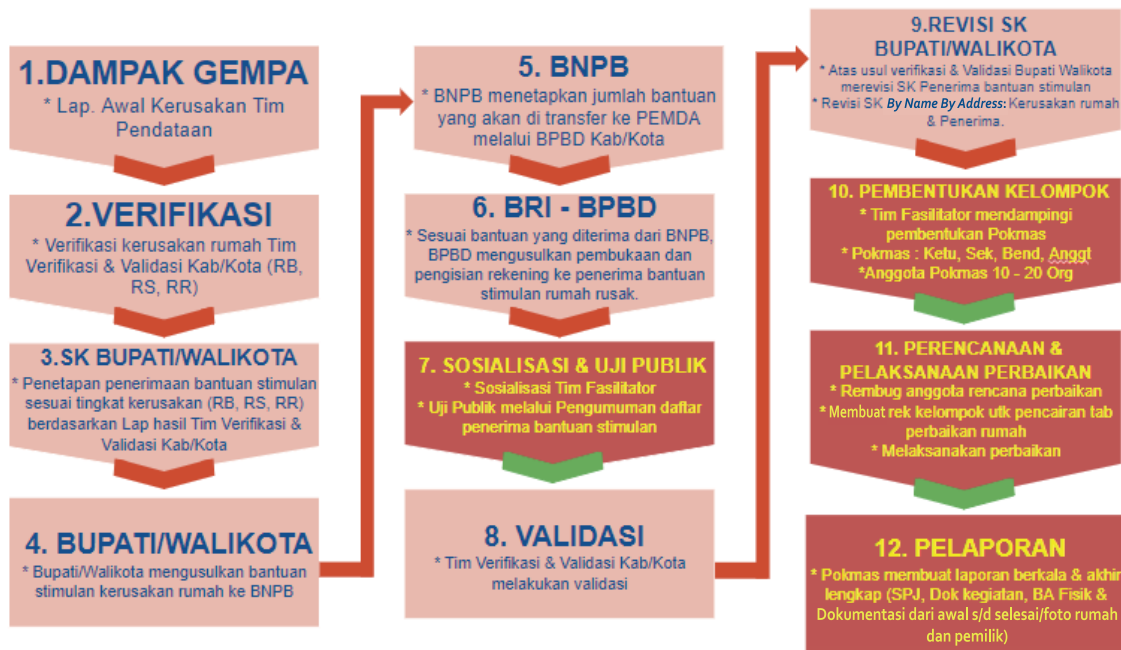


Peta Sebaran Titik Rumah Terdampak



Masyarakat yang rumahnya terdampak dan tidak masuk dalam area yang direlokasi akan mendapatkan sejumlah bantuan dana stimulan perbaikan rumah yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat kerusakannya yaitu rusak berat sebesar Rp 60 juta, rusak sedang sebesar Rp 30 juta, dan rusak ringan sebesar Rp 15 juta. Bagi masyarakat dengan kondisi rumah rusak berat, disediakan pilihan untuk melakukan renovasi rumah menggunakan

kontraktor dan secara mandiri atau swadaya. Kontraktor yang digunakan merupakan aplikator RTG yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BNPB. Sedangkan bagi masyarakat yang melakukan pembangunan rumah secara swadaya didampingi oleh insinyur muda dari Kementerian PUPR. Adapun dalam melakukan renovasi diwajibkan untuk memakai standar bangunan tahan gempa dan dilakukan pendampingan secara rutin di lapangan.



BERDASARKAN PETUNJUK BNPB 2018

 = PELIBATAN FASILITATOR KEMENTERIAN PUPR

Diagram Alur Bantuan Dana Stimulan untuk Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak

Dalam rangka menguatkan langkah mitigasi ke depan, Kementerian PUPR melalui BP2P Jawa Barat juga telah memulai berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Barat untuk mengedukasi masyarakat terkait kesadaran untuk membangun Rumah Tahan Gempa (RTG) memanfaatkan

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, BPPW Jawa Barat telah menjalin kerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) untuk terus berinovasi dalam membuat desain yang lebih mutakhir untuk Rumah Tahan Gempa (RTG) agar proses pembangunan ke depan dapat lebih cepat dan efisien.



Masyarakat yang rumahnya terdampak dan tidak masuk dalam area yang direlokasi mendapatkan sejumlah bantuan dana stimulan perbaikan rumah sesuai tingkat kerusakannya

7. Penerjunan CPNS 2021: Momentum Pembekalan dan Pengalaman Generasi Muda

Sebagai bentuk upaya pendampingan langsung kepada masyarakat, Kementerian PUPR mengirimkan Insinyur Muda (Ir. Muda) yang terdiri dari Calon Pegawai/Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR melalui Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/SPRIN/SJ/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penugasan Calon/Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR dalam Penanganan Pasca Bencana di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Sebelum penugasan, pada Ir. Muda diberikan pelatihan serta pembekalan terkait kebencanaan. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta, dan Wilayah IV Bandung. Penugasan Ir. Muda ini diharapkan dapat melatih berbagai *skill* yang dimiliki karena lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan erat dengan teknis serta memberikan pengalaman yang akan selalu diingat dalam perjalanan karir mereka berkaitan langsung dengan masyarakat.

Sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor 13/SPRIN/SJ/2022 perihal Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR dalam Penanganan Pasca Bencana di Kabupaten Cianjur, Kementerian PUPR menugaskan Ir. Muda yang dibagi dalam beberapa kelompok keberangkatan di mana terdapat sebanyak 100 orang per kelompok selama periode 22 Desember 2022 sampai dengan 18 April 2023. Pemberangkatan Ir. Muda dilakukan secara bertahap dengan tujuan bisa melakukan *transfer knowledge* atau evaluasi dengan tim yang telah diberangkatkan sebelumnya dengan tim selanjutnya yang akan terjun ke lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar tim yang diberangkatkan selanjutnya dapat melanjutkan pendampingan kepada masyarakat dengan *knowledge* yang lebih baik agar proses di lapangan dapat berjalan dengan lebih baik lagi.



Kementerian PUPR mengirimkan Insinyur Muda (Ir. Muda) yang terdiri dari Calon Pegawai/Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR



Arahan Menteri PUPR Dalam Pembekalan CPNS untuk Gempa Cianjur



Pembekalan CPNS untuk Penanganan Gempa Cianjur

Sebaran Tim Insinyur Muda untuk Cianjur

Unit Organisasi	CPNS (orang)	Pembagian Tim (orang)			
		I	II	III	IV
Ditjen. Perumahan	30	30	-	-	-
Ditjen. Cipta Karya	50	20	10	10	10
Ditjen. Bina Marga	50	-	20	15	15
Ditjen. Sumber Daya Air	50	-	10	20	20
Ditjen. Bina Konstruksi	20	-	10	5	5
Jumlah	200	50	50	50	50
Tanggal Aktif		22 Desember 2022 s/d 24 Februari 2023	31 Januari 2023 s/d 18 April 2023	24 Februari 2023 s/d 18 April 2023	-



Evaluasi Berkala Kegiatan Insinyur Muda di Kab. Cianjur



Sosialisasi Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk Rekonstruksi Pasca Bencana

Sebagai upaya pendampingan yang dilakukan oleh para Ir. Muda diselenggarakan beberapa kegiatan di antaranya yaitu sosialisasi Rumah Tahan Gempa, penyediaan klinik konsultasi teknis. Selain itu, untuk menambah kekuatan personal yang diterjunkan maka para Ir. Muda dioptimalkan juga untuk

membantu keperluan internal seperti melaksanakan perakitan set Hidran Umum. Berdasarkan SK Bupati Cianjur terkait penerima bantuan tahap I dan tahap II, terdapat sejumlah 3.994 unit rumah rusak berat yang perlu pendampingan. Rumah-rumah tersebut tersebar di 10 kecamatan dan 65 desa/kelurahan.

Program Pendampingan Insinyur Muda RTG Tiap Kecamatan

Total Unit Terdampangi								
No	Kecamatan	Jumlah Unit Terdampak Rusak Berat	Jumlah Unit Terdampangi	% Unit Tedampangi	Metode Pembangunan			
					Konvensional	Rumbako	Domus	Riksa
1	Cianjur	1.089	881	81%	788	88	1	4
2	Karangtengah	45	16	36%	13	3	0	0
3	Cilaku	502	455	91%	448	3	1	3
4	Cibeber	20	17	85%	13	0	0	4
5	Pacet	992	964	97%	771	193	0	0
6	Sukaresmi	62	60	97%	60	0	0	0
7	Cipanas	8	2	25%	1	1	0	0
8	Warungkondang	1.015	851	84%	812	23	15	1
9	Gekbrong	249	83	33%	80	0	3	0
10	Mande	12	10	83%	3	0	7	0
Total		3.994	3.329	83%	2.986	311	20	12




Pendampingan Teknis CPNS Rumah Tahan Gempa (RTG)

Selama kegiatan pendampingan, Insinyur Muda Kementerian PUPR telah mengupayakan agar rekonstruksi rumah rusak berat secara mandiri oleh warga sesuai dengan konsep Rumah Tahan Gempa (RTG). Namun pada pelaksanaan di lapang terdapat kendala teknis maupun non teknis. Untuk meminimalisir

ketidaksesuaian yang terjadi, maka dilakukan koordinasi dengan tim teknis daerah, aplikator, dan satgas TNI. Selain itu, upaya persuasif juga dilakukan dengan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membangun sebuah bangunan yang lebih aman di daerah rawan bencana.

PENANGANAN **GEMPA** CIANJUR

**EVALUASI DAN
PEMBELAJARAN**

- 
- Penguatan regulasi dan kelembagaan kebencanaan
 - Menguatkan kesiapsiagaan sumber daya kebencanaan
 - Perbaiki administrasi penyaluran bantuan di lapangan
 - Memperbaiki kualitas pekerjaan rehabilitasi-rekonstruksi bangunan
 - Menjamin transparansi dan akuntabilitas
 - Memperbaiki komunikasi, meminimalisir miskoordinasi
 - Memperbaiki komunikasi, meminimalisir miskoordinasi
 - Mendorong penguatan kapasitas dan berdayanya Pemerintah Daerah

EVALUASI DAN PEMBELAJARAN

4 BAB A B

Penanganan pasca bencana gempa Cianjur 2022 menyisakan beberapa catatan baik dari segi teknis di lapangan hingga level strategis (kebijakan). Berbagai masalah tersebut diinventarisir sebagai pelajaran berharga dalam penanganan bencana Kementerian PUPR bersama segenap stakeholder terkait. Seperti yang telah kami utarakan di awal buku ini, bahwa jangan sampai pengalaman bekerja hanya menempel di badan para pelakunya namun tidak didokumentasikan. Jika tidak didokumentasikan, maka pengalaman itu tidak diturunkan kepada generasi berikutnya karena badan ada umurnya. Sehingga akibatnya, setiap berganti orangnya, maka kecenderungannya memulai dari nol.

Penanganan bencana alam sangat bergantung pada kapasitas negara dalam menyelenggarakan kebijakan publiknya. Mengacu pada Howlett (2020), kerangka kapasitas negara meliputi level individual (birokrat/aparatur negara), organisasi, dan sistem. Kapasitas individu (misal pada high-level executive) yang tinggi tidak lantas menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan jika pada level organisasi tidak mengikuti; begitu pula pada level sistem dan vice versa. Berangkat dari hal tersebut, Bagian ini memaparkan refleksi atas pengalaman dan berbagai problem yang dihadapi saat penanganan gempa Cianjur selama 2022 hingga 2023 beserta pembelajaran dan rekomendasinya guna meningkatkan peran-kapasitas Kementerian PUPR dan tiap pihak agar semua upaya tidak dimulai dari nol.



Gempa bumi yang menyebabkan kerusakan di Cianjur-Sukabumi telah terjadi sebanyak 14 kali



Sumber

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6426087/video-rumah-warga-miring-imbas-guncangan-daahsyat-gempa-cianjur>



Sumber

<https://www.detik.com/jabar/foto/d-6423142/menengok-kondisi-terkini-di-titik-terparah-gempa-cianjur>

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan kebencanaan

Regulasi menjadi instrumen penting dalam implementasi kebijakan publik karena memberikan pedoman, kaidah, dan kepastian hukum atas setiap tindakan pemerintah. Saat ini muncul kebutuhan akan pengaturan ulang (re-regulate) beberapa hal mulai dari konsepsi penanganan kebencanaan, kelembagaan kebencanaan, hingga kebijakan teknis terkait seperti tata ruang dan peruntukan lahan.

Pertama, belum ada Permen PUPR yang secara khusus memberikan pedoman penanggulangan bencana secara komprehensif bagi setiap unit kerja terkait. Selama ini mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian PUPR yang mana dianggap sudah tidak relevan dan kekuatan hukumnya tidak bersifat pengaturan (regels) melainkan keputusan (beschikkings). Salah satunya adalah Ketua Satgas Pusat Komando yang di SK dijabat oleh Wakil Menteri sedangkan saat ini sudah tidak ada posisi Wakil Menteri di Kementerian PUPR. Pada penanganan gempa bumi Cianjur tahun 2022, di Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 634/KPTS/Sj/2022 tentang Pembentukan Satgaslak Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur, Ketua Satgas dijabat dari Ditjen Bina Marga dengan Wakil Ketua dari Ditjen Perumahan; sesuatu yang sebenarnya kurang sesuai dengan SK Menteri PUPR 1176 Tahun 2019. Namun keputusan tersebut harus diambil karena perlu segera mengisi kekosongan hukum.

Perlunya Permen PUPR tentang penanggulangan bencana secara khusus ditujukan untuk merapikan struktur kelembagaan penanganan

bencana, ruang lingkup tugas sesuai dengan tingkatan bencana, mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya, skala bencana dan responnya, serta berbagai urusan konsolidasi internal.

Kedua, revisi atas berbagai regulasi teknis lain juga diperlukan. Misalnya adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi. Revisi dimaksudkan untuk memasukkan sesar/daerah potensi gempa bumi baru yang muncul sekaligus menilik ke belakang sejauh mana efektivitas implementasinya di lapangan. Seiring perubahan nomenklatur di Kementerian PUPR, revisi permen tersebut dapat disinergikan dengan Kementerian ATR/BPN. Revisi sejalan dengan amanat Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memadukan risiko bencana dengan program pembangunan.

Ketiga, perlu perbaikan kualitas pemanfaatan tata ruang sekaligus pengendaliannya. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus menyediakan informasi Geologi Lingkungan. Seperti halnya poin kedua sebelumnya, peta geologi tata lingkungan ini dapat berubah menyesuaikan data kegempaan terbaru. Kemampuan para perencana di daerah dalam memahami Potensi Sumber Daya Geologi dan karakter bahaya geologi serta cara menuangkannya dalam tata ruang juga perlu untuk ditingkatkan. Pada area/wilayah yang berada di zona kesesuaian lahan sangat rendah karena terjadinya gerakan tanah dan bangunan yang telah ada disarankan agar direlokasi. Begitu pula dengan perizinan bangunan gedung juga perlu diperketat baik dari segi lokasi maupun spesifikasi bangunannya. Hasil identifikasi menunjukkan pasca gempa Cianjur di 2009 ternyata tidak ada perubahan perilaku oleh masyarakat dalam membangun rumah atau bangunan yang terstandar tahan gempa.



Pertama, belum ada Permen PUPR yang secara khusus memberikan pedoman penanggulangan bencana secara komprehensif bagi setiap unit kerja terkait.

Kedua, revisi atas berbagai regulasi teknis lain juga diperlukan.

Ketiga, perlu perbaikan kualitas pemanfaatan tata ruang sekaligus pengendaliannya.

2. Memperkuat kesiapsiagaan sumber daya kebencanaan

Salah satu hal baik dalam penanganan bencana Cianjur adalah mobilisasi sumber daya manusia yang cepat baik saat tanggap darurat hingga proses rehabilitasi. Ditugaskannya CPNS Angkatan 2021 sebagai Insinyur Muda dalam penanganan gempa Cianjur menjadi praktik baik bagaimana akselerasi pembelajaran langsung diberikan sedari awal sehingga ke depan mereka telah memiliki bekal tidak hanya dalam hal teknis namun juga keterlibatan langsung dengan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan evaluatif terkait kesiapsiagaan sumber daya kebencanaan yang memerlukan atensi.

Pertama, ketersediaan data harus cepat dan akurat. Ketersediaan data khususnya terkait kejadian bencana yang terjadi akan sangat berdampak pada tindakan yang diambil di lapangan. Sebagai contohnya, apabila data jumlah korban dan lokasi pengungsian akan mempermudah tim untuk menyalurkan bantuan terkait kebutuhan dasar serta membuka akses apabila terdapat daerah yang terputus aksesnya. Namun dalam kondisi terjadi bencana alam, dengan banyaknya institusi yang terlibat, berpacu dengan proses evakuasi dan pemulihan masyarakat, serta tingginya sorotan media massa menjadikan penyediaan data yang cepat dan akurat menjadi suatu tantangan tersendiri. Koordinasi yang kuat semua institusi, komando yang terarah di lapangan, dan penggunaan teknologi informasi akan sangat membantu dalam penyediaan data bencana.

Kedua, dari segi ketersediaan sumber daya kebencanaan seperti Disaster Relief Unit (DRU) dan Self Loader perlu diperbanyak. Ini memerlukan koordinasi dengan BNPB/BPBD dan Pemda



setempat agar manakala bencana terjadi maka berbagai alat berat yang diperlukan sudah tersedia untuk didistribusikan. Selain itu juga perlu disiapkan lokasi yang mudah diakses untuk menempatkan berbagai alat berat tersebut.

Sebagai langkah mitigasi, infrastruktur seperti ground tank yang tahan gempa perlu disiapkan. Ground Tank merupakan tangki yang terletak di bawah permukaan tanah atau sebagian tertanam dalam tanah untuk menyimpan air. Ground tank water dapat memiliki kapasitas yang bervariasi, tergantung pada kebutuhan lokal. Tangki ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi seperti beton bertulang, baja, atau plastik khusus. Untuk bangunan fasilitas umum atau perkantoran perlu disiapkan infrastruktur semacam ini untuk menghindari kelangkaan sumber daya air apabila terjadi bencana gempa bumi.

Ketiga, kapasitas sumber daya manusia kebencanaan perlu ditingkatkan di tiap level pemerintahan. Ini menyangkut terkait pengetahuan atas langkah apa saja yang diperlukan manakala bencana terjadi seperti koordinasi internal-eksternal, kesiapan personil, langkah penentuan lokasi pengungsian, cara identifikasi kerusakan, hingga perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi untuk pemulihan pasca bencana. Komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah di daerah juga harus diperkuat, salah satunya dengan tersedianya media komunikasi yang bisa menghubungkan antar pihak terkait mengingat ketika terjadi bencana pada umumnya orang akan cenderung panik dan bingung. Selain itu, masyarakat juga harus dibekali pengetahuan terkait apa yang harus dilakukan manakala bencana terjadi dan lokasi aman dan pengungsian. Pembekalan yang dilakukan diharapkan bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat manakala terjadi suatu bencana. Selain itu jika masyarakat lebih memahami karakteristik lingkungan tempat tinggalnya, maka mereka dapat mulai beradaptasi dengan

melakukan tindakan pencegahan seperti membuat bangunan yang sesuai standar, menghindari aktivitas di sekitar lokasi rawan bencana, dan lain sebagainya. Selain itu, khusus untuk bidang Jalan, peran Penilik Jalan juga dapat diberdayakan untuk memonitor kondisi titik-titik yang berpotensi terjadi longsor manakala gempa atau curah hujan tinggi sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi secara tepat.

Keempat, keselamatan para petugas di lapangan perlu perhatian lebih. Hal ini menyangkut perlunya memastikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) setidak-tidaknya dengan memberikan alat pelindung seperti helm dan pakaian yang aman. Pengawasan K3 di lapangan juga perlu dilakukan agar para personil yang bertugas lebih menyadari keselamatan masing-masing dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan. Selain itu, suplai makanan kepada petugas harus juga dipastikan berjalan lancar.

Kelima, kebijakan untuk menyediakan stock RISHA di beberapa wilayah yang berpotensi bencana perlu dilakukan lebih banyak. RISHA merupakan teknologi yang saat ini tepat diaplikasikan di daerah yang rentan bencana. Penyediaan stok saat ini telah tersebar di beberapa kota besar dengan harapan dapat menjangkau daerah di sekitarnya di antaranya seperti Medan, Bandung, dsb. Upaya tersebut akan lebih optimal dan memadai apabila instansi seperti Pemda dapat juga melakukan penyediaan stok yang ada di masing-masing daerahnya terutama yang rentan bencana.

Elaborasi kebijakan lintas sektoral juga dapat dilakukan misalnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR turut mensosialisasikan bagaimana membangun rumah tahan gempa (RTG). Kegiatan ini dapat pula dikolaborasikan dengan Dinas Perumahan & Permukiman di tiap daerah.

3. Perbaikan administrasi penyaluran bantuan di lapangan

Pelaksanaan penyaluran bantuan saat bencana Cianjur memberikan pembelajaran beberapa hal. **Pertama, perlu adanya pertimbangan kondisi aktual di lapangan dan penyesuaian SOP jika dibutuhkan untuk merespon hal tersebut.** Terjadinya beberapa insiden seperti miskomunikasi hingga keributan dapat dicegah kedepannya manakala ada perwakilan bank yang hadir dan berkomunikasi sebelumnya dengan pihak perwakilan desa/masyarakat sehingga mekanisme penyaluran dapat berjalan rapi dengan langkah-langkah antisipatif sebelumnya. Selain itu, seringkali pihak desa kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis seputar administrasi bantuan sehingga kehadiran perwakilan bank dirasa penting. Gagasan seperti dibentuknya klinik one-stop service hingga mobile banking vehicle guna percepatan proses pencairan bantuan adalah sesuatu yang baik untuk digalakkan kedepannya.

Kedua, perbaikan akurasi data penerima perlu ditingkatkan. Kejadian seperti satu rumah yang terdiri dari 2 (dua) KK dan keduanya menerima bantuan hingga kendala pengambilan buku rekening karena status perceraian yang belum diperbarui memberikan pembelajaran mengenai pentingnya perbaikan data. Hal ini juga membutuhkan keaktifan peran serta pihak desa untuk verifikasi data.

Ketiga, penguatan komunikasi dalam administrasi penyaluran juga dibutuhkan. Misalnya adalah sebagian besar kepala desa dan masyarakat baru mengetahui terkait penyaluran dana termin 2 sebesar 60% akan baru dilakukan ketika rumah sudah 100% selesai direkonstruksi. Pihak masyarakat sendiri memberikan komplain dan berkeinginan agar pencairan tahap

pertama-lah yang sebesar 60% dan tahap kedua 40%; bukan sebaliknya. Ke depan, diperlukan peninjauan ulang kebutuhan besaran pencairan dilihat dari kondisi aktual di lapangan serta pemberian pemahaman ke masyarakat.



Sumber
<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/438790/kementerian-pupr-ri-distribusikan-prasarana-dan-sarana-air-bersih-dan-sanitasi-untuk-bantu-pengungsi-gempa-cianjur>



Sumber
<https://rm.id/baca-berita/government-action/151340/pupr-distribusikan-air-bersih-untuk-warga-gempa-cianjur>



4. Memperbaiki kualitas pekerjaan rehabilitasi-rekonstruksi bangunan

Penyebab utama jatuhnya korban jiwa saat terjadi gempa adalah struktur bangunan yang tidak memenuhi standar mutu Rumah Tahan Gempa (RTG). **Pertama, identifikasi kerusakan untuk ditangani harus dilakukan secara cermat.** Hal ini termasuk perlunya memastikan kecukupan jumlah personil dan waktu dalam melakukan survei/identifikasi di lapangan. Kedepan, pihak Pemda juga perlu memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk melakukan asesmen identifikasi kerusakan. Ketepatan atas identifikasi juga perlu salah satunya merespon kasus seperti di satu lokasi terdapat 2 bangunan yang ditangani walau salah satunya tergolong rusak ringan. Kasus lain seperti perlunya penguatan DPT di daerah sungai yang awalnya tidak teridentifikasi berujung pada pembengkakan biaya. Selain itu, kedepan juga diperlukan peningkatan pengetahuan teknis tentang bangunan/sipil misalnya dalam memprediksi kebutuhan biaya untuk tiap tingkat kerusakan.

Kementerian PUPR sebagai instansi yang menangani infrastruktur juga dapat mempersiapkan sumber daya kebencanaan internal seperti pembekalan terkait asesmen dan identifikasi kerusakan bangunan kepada pegawai dengan lebih intensif lagi. Sehingga, ketika terjadi kejadian bencana akan banyak pilihan personil dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk membantu mempercepat identifikasi dampak suatu bencana dengan akurasi hasil asesmen yang semakin akurat.

Kedua, pengawasan dan pendampingan di lapangan secara lebih masif, rutin, dan tegas sangat diperlukan. Ini merespon beberapa rumah yang sudah mulai dibangun ulang secara swadaya namun belum memenuhi standar RTG ditinjau dari sistem struktur dan detail konstruksinya. Umumnya dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terkait prinsip dan detail standar RTG. Rekonstruksi ulang dengan tidak memenuhi standar RTG tidak akan mengurangi potensi bahaya manakala terjadi gempa di masa mendatang. Pengetatan pengawasan pada pekerjaan non-swadaya juga diperlukan seperti terhadap aplikator Rumbako atau pihak ketiga karena di lapangan Tim masih menemukan ketidaksesuaian pekerjaan konstruksi. Ketidaksesuaian ini sebagian besar terjadi pada pelaksanaan spesifikasi teknisnya seperti tulangan banci, jarak sengkang yang tidak sesuai, dan sebagainya. Ke depan, diperlukan SOP Pendampingan/Pengawasan Teknis RTG dengan tiga klasifikasi pendampingan, yaitu Pendampingan dengan DED dan RAB, Pendampingan tanpa DED dan RAB, serta Pendampingan Aplikator.

Ketiga, pemberian pelatihan secara khusus kepada para tukang atau pekerja bangunan sangatlah penting. Beberapa kasus yang ditemukan dan hasil dari diskusi dengan mandor di lapangan menunjukkan terdapat tukang/pekerja yang tidak mengetahui standar RTG karena tidak diberikan pelatihan oleh pihak aplikator. Hal ini juga termasuk kebutuhan untuk suplai tenaga kerja yang memadai dan sesuai dengan kompetensi mengingat terdapat kasus dimana suplai oleh pihak desa bukan oleh vendor yang ditunjuk aplikator tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk melaksanakan konstruksi RTG.

Keempat, seringkali masyarakat mengalami keterbatasan kemampuan untuk menyusun DED dan RAB. Oleh karena itu perlu dikomunikasikan sejak awal bahwa masyarakat dengan



Penyebab utama jatuhnya korban jiwa saat terjadi gempa adalah struktur bangunan yang tidak memenuhi standar mutu Rumah Tahan Gempa (RTG).



Sumber

<https://setkab.go.id/presiden-tinjau-progres-pembangunan-rumah-tahan-gempa-di-cianjur/>

5. Menjamin transparansi dan akuntabilitas

Keadaan darurat (kahar) tidak lantas membuat prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak diindahkan. Berikut beberapa catatan evaluatif dan pembelajaran penanganan bencana Cianjur selama 2022 hingga 2023 dari aspek transparansi dan akuntabilitas.

Pertama, peraturan terkait pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat belum mengatur hal-hal teknis yang lebih detail. Isu terkait peraturan hal mendasar ini misalnya terkait mekanisme pembayaran termin dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran yang keduanya diperlukan pedoman khusus dengan dukungan regulasi yang memadai. Selain itu, pembayaran jasa kepada kontraktor pelaksana sempat mengalami keterlambatan yang kemudian dapat mengganggu progres pekerjaan. Kedepan diperlukan kesamaan cara pandang atas urgensi dan legal blanket yang memadai antar instansi.

Kedua, komitmen pembayaran tepat waktu kepada kontraktor dan konsultan supervisi. Perubahan masa pelaksanaan konstruksi fisik membuat konsultan supervisi tidak bisa menambah anggaran. Pada kejadian ini terdapat beberapa alternatif seperti masa kontrak supervisi mengikuti penyelesaian konstruksi fisik dengan pengurangan jumlah personil atau masa kontrak sesuai rencana awal namun pengawasan tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya pekerjaan konstruksi tanpa dibayar. Selain itu, keterlambatan pembayaran kepada

kontraktor membuat pekerjaan dapat terhambat akibat kontraktor yang tentu memiliki keterbatasan anggaran modal. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengembangkan skema yang pada prinsipnya harus ada keadilan dan pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan tanpa mengorbankan kualitas konstruksi.

Ketiga, kewajaran dalam harga upah dan bahan. Rekomendasi utamanya adalah perlunya pembuktian dengan Keputusan Kepala Daerah untuk penentuan harga upah dan bahan serta jika terdapat perubahan penggunaan bahan harus didukung dengan justifikasi yang memadai dan perlu negosiasi terhadap harga satuannya.

Keempat, disiplin administrasi. Meskipun berkaitan dengan kebencanaan, kerapian administrasi tetap diperlukan. Hal ini termasuk kesadaran untuk mendokumentasikan setiap hal secara rapi agar manakala dilakukan pemeriksaan pasca pekerjaan selesai maka dokumentasi dan segala berkas administratif tersedia.



6. Memperbaiki komunikasi, meminimalisir miskoordinasi

Komunikasi menjadi bagian penting dalam kebijakan publik. Howlett (2020) menyatakan bahwa mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kebijakan secara proper dan proaktif menjadi satu kondisi untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Pengalaman penanganan gempa Cianjur menyisakan beberapa pembelajaran berharga mengenai ini.

Pertama, penguatan koordinasi antar level pemerintahan menjadi kunci. Salah satu hambatan terbesar saat tanggap darurat adalah sempat terjadi penghalangan mobilisasi alat berat oleh aparat dan masyarakat hingga demonstrasi akibat miskomunikasi dan miskoordinasi meskipun telah membawa identitas tim PUPR. Karenanya ini menjadi kunci kedepan di mana setiap Pemda dan pihak terkait harus sudah memiliki rencana manakala suatu bencana besar terjadi seperti lokasi posko koordinasi terpusat dan siapa melakukan apa. Contoh spesifik lain misalnya pada penyaluran Hidran Umum (HU) oleh PUPR memerlukan informasi satu pintu agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan serta mudah untuk memonitor dan menyalurkan air nantinya.

Masalah lain yang terjadi (dan kerap terjadi di banyak tempat) adalah berkerumunnya masyarakat yang hendak menyaksikan proses evakuasi di lokasi bencana. Kedepan, aparat setempat harus mencegah hal ini agar tindakan penanganan tanggap darurat dapat dilaksanakan secepat mungkin.

Sebelumnya sempat berkembang persepsi bahwa kegiatan sosialisasi RTG berjalan sendiri-sendiri dimana Kementerian PUPR terkesan mengambil inisiatif tanpa berkoordinasi dengan pihak Pemda-Pemdes. Oleh karena itu, kedepan jadwal sosialisasi perlu didistribusikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepada Forkopimcam (Kecamatan) dan Forkopimdes (Desa) agar berbagai pihak tersebut dapat terlibat dalam kegiatan tersebut secara efektif dan aktif. Pun tanpa menunggu bencana terjadi, sosialisasi serupa perlu dilakukan oleh daerah.

Selain itu, setiap berkala perlu ada review atas hasil pendampingan Tim Insinyur Muda/pengawas konstruksi agar seluruh stakeholder terkait mengetahui kondisi di lapangan sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kedua, proaktif dalam memberikan informasi diperlukan sebagai counter-narrative hoax dan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Pada penanganan bencana Gempa Bumi Cianjur 2022, sempat terdapat hoax yang tersebar bahwa masyarakat dipaksa menggunakan jenis rumah yang disediakan oleh vendor dari pihak BNPB melalui Kementerian PUPR. Hoax juga sempat tersebar mengenai informasi jalan yang terputus dan tidak bisa dilalui. Selain itu terdapat banyak preseden terkait ketidakpahaman masyarakat mengenai mekanisme pencairan bantuan. Menggalakkan informasi melalui berbagai kanal dan media perlu digalakkan untuk mengatasi hoax dan memberikan pemahaman yang penuh kepada masyarakat. Pun juga tim komunikasi di tiap instansi perlu memastikan kebenaran informasi yang disebar oleh media.





7. Mendorong penguatan kapasitas dan berdayanya Pemerintah Daerah

Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana seperti pengalokasian APBD hingga pemenuhan hak masyarakat terdampak sehingga peran Pemda tidak kalah penting. Berdasarkan perjalanan penanggulangan bencana Cianjur 2022-2023 ini, beberapa pembelajaran dan rekomendasi perlu didorong.

Pertama, Pemda harus lebih proaktif dan serius dalam menanggulangi dampak bencana. Hingga beberapa bulan pasca bencana misalnya masih terdapat aspirasi dari masyarakat mengenai ketidakpastian

kapas penanganan sekolah dengan kategori rusak ringan dan sedang oleh Pemda sementara ribuan anak didik membutuhkan pendidikan yang layak dan aman. Kementerian PUPR dapat mendorong ini dalam kerangka binwas teknis sebagaimana dijamin oleh PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran Pemda yang memadai dalam merespon bencana juga diperlukan secara jangka pendek dan menengah mengingat berbagai bencana berpotensi menurunkan indeks kualitas infrastruktur daerah sehingga memerlukan re-alokasi APBD dan penyusunan ulang prioritas kebijakan pembangunan daerah. Selain itu yang tidak kalah penting adalah komitmen dukungan anggaran Pemda untuk rehabilitasi-rekonstruksi. Kedepan, tidak semua hal diambil alih pekerjaannya atau tergantung pada Pemerintah Pusat. Misalnya pada rehab-rekon fasilitas kesehatan, jika mengacu pada standar dari Kementerian Kesehatan, maka seluruh fasilitas harus diganti/diperbaiki.



Penyebab utama jatuhnya korban jiwa saat terjadi gempa adalah struktur bangunan yang tidak memenuhi standar mutu Rumah Tahan Gempa (RTG).

Namun tentu hal tersebut tidak bisa seluruhnya ditangani Kementerian PUPR. Disinilah peran Pemda diharapkan dapat lebih proaktif terlibat.

Pemerintah Daerah seyogyanya melaksanakan tanggung jawab otonomi daerah dengan menyelenggarakan rehabilitasi-rekonstruksi juga melalui komitmen anggaran dan pembangunan. Tidak hanya ketika bencana telah terjadi dilakukan realokasi anggaran, namun juga pada kegiatan-kegiatan terkait kesiapsiagaan pra-bencana. Misalnya adalah ditemukannya beberapa fasilitas yang telah rusak bukan karena bencana melainkan minimnya pemeliharaan yang mana pada akhirnya ikut ditangani Kementerian PUPR.

Kedua, perlu binwas teknis kepada Tim Teknis Daerah berupa sosialisasi konsep RTG. Ini penting karena tidak seluruh anggota tim teknis daerah memiliki latar belakang pendidikan teknis yang secara spesifik menguasai

standar RTG. Disamping itu komunikasi antar tim di Pemda sangat diperlukan. Ini misalnya tampak pada contoh belum adanya koordinasi yang baik antara Kecamatan Pacet dengan Tim Teknis Daerah yang bertugas di Kecamatan Pacet menyebabkan kebingungan yang menciptakan kesan dinas melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri. Penekanan koordinasi bukan hanya pada tingkat Desa.

Berbagai rekomendasi di atas semoga dapat menjadi acuan untuk penanganan bencana di masa mendatang.

PENANGANAN **GEMPA** CIANJUR

**KESAN DAN
KESAN**



● Apa Kata Mereka

KESAN DAN PESAN

BAB 5

“
Apa
Kata
Mereka



“Dalam kondisi terjadi bencana alam, PUPR harus terjun langsung ke daerah terdampak bencana. Dibutuhkan kesiapsiagaan penanganan bencana dalam membantu masyarakat terdampak.”



**Ir. Achmad Gani
Ghazaly Akman,
M.Eng.Sc.**

Staf Ahli Menteri
Bidang Keterpaduan
Pembangunan Periode
2018-2023/Ketua Satgas
Bencana Cianjur PUPR



**Wilan Oktavian,
S.T., M.P.P.M**

Kepala Balai Besar
Pelaksanaan Jalan
Nasional DKI
Jakarta - Jawa
Barat Periode
2021- Mei 2023

“Kekompakan bangsa Indonesia sangat terlihat dalam masa penanganan bencana. Semua Kementerian/Lembaga/Instansi yang terlibat bersama masyarakat saling mendukung hingga bencana gempa bumi Cianjur yang besar dapat ditangani dengan cepat.”

“



**Ir. M. Hidayat,
M.M.**

Sekretaris Direktorat
Jenderal Perumahan

“Bencana itu sesuatu yang tidak kita inginkan tapi pasti terjadi yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Oleh karena itu kesiapsiagaan adalah sesuatu tidak bisa kita abaikan. Kehadiran insinyur muda mencerahkan masyarakat atas konstruksi yang baik, *build back better.*”



Ir. Bastari, M.Eng.

Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai
Citarum

“Saat terjadi bencana kita harus bergerak cepat, mengerahkan segala potensi yang kita miliki karena situasi di lapangan seringkali tidak sesuai yang kita prediksi. Apalagi ketika semua pihak telah mempercayakan kepada PUPR. Alhamdulillah di PUPR sudah ada budaya kesiapsiagaan.”

“Bencana itu sering terjadi; tidak melihat waktu dan situasi. Karena itu kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini sehingga kerusakan dan korban bisa diantisipasi.”



**Oscar R.H.
Siagian, S.T.**

Kepala Balai Prasarana
Permukiman Wilayah
Jawa Barat

“Proses tidak akan
menghianati hasil”.



**Kiagoos Egie
Ismail, S.T., M.T.**

Kepala Balai
Pelaksana Penyediaan
Perumahan Jawa II

“

“Kesiapsiagaan harus dimulai dari hal kecil. Jika dari OP sudah kompak maka tingkat Balai pun kekompakkan akan bisa lebih terbentuk. Jadi kekompakkan adalah hal yang utama.”



**Abdul Ghoni Majdi,
S.T., MPSDA**

Kepala Bidang
Keterpaduan
Pembangunan
Infrastruktur Sumber
Daya Air, Balai Besar
Wilayah Sungai
Citarum

“Bersyukur kita punya tim yang sangat kompak. Ketika instruksi telah dikeluarkan, segala sesuatu langsung berjalan terarah.”



**Leni Sukma Prihandani,
S.T., MPSDA**

Teknik Pengairan Ahli Muda
Seksi Pelaksanaan Operasi dan
Pemeliharaan, Bidang Operasi
dan Pemeliharaan, Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum



**Muhammad Iqbal
Perkasa, ST., M.Sc.**

Kepala Satker BPPW
Jabar Wilayah II

“Harapannya untuk Pemerintah Daerah terkait supaya infrastruktur yang sudah dibangun dan diserahkan agar dapat dirawat dengan baik dan memiliki sense of belonging yang tinggi.”



“Kami berharap personil ke depan bisa ditambah agar dalam pelaksanaan monitoring di lapangan dapat lebih menjangkau secara luas. Kerja semangat, jangan lupa jaga kesehatan.”

**Wibiasana
Bismanara, S.T., M.T.**

Kepala Satker BPPW
Jabar Wilayah I



**Rendra Yudhi
Agustian, S.T., M.T.**

PPK 5.3 Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah
V Provinsi Jawa Barat,
Balai Besar Pelaksanaan
Jalan Nasional DKI
Jakarta - Jawa Barat

“Alhamdulillah ini adalah pengalaman yang memberikan pembelajaran positif bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan dapat menjadi sumbangsih terbaik untuk masyarakat dan negara. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Cianjur dan secara kualitas konstruksi infrastrukturnya dapat bertahan lama. Kami berharap seluruh pihak dapat ikut menjaganya.”



**R. Erie
Hariansyah, S.T.**

“Saya berharap ke depan fasilitas penanganan bencana terutama untuk tanggap darurat dapat terpenuhi baik untuk masyarakat terdampak maupun untuk personil yang ada di lapangan.”

PPK Tanggap Darurat,
BPPW Jabar

“Kita menjadi orang PUPR harus sigap karena kita dibutuhkan masyarakat. Seperti motto kita: Bekerja keras, Bergerak cepat, Bertindak Tepat.”



**Asep
Rochiman, A.Md.**

Pengelola Keuangan PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II, Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Citarum, Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum



**Gama Imy
Hartanto, S.Kom.**

Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Data dan Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

“Dukungan Informasi, data, komunikasi, serta koordinasi yang tepat dan terarah dari pimpinan sesuai kondisi lapangan dalam siklus manajemen bencana, merupakan bagian penting dalam mendukung progres percepatan pasca bencana dan pemulihan”

PENANGANAN **GEMPA** **CIANJUR** 2022







KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENANGANAN **GEMPA** **CIANJUR** 2022



SATGAS PENANGGULANGAN
BENCANA PUPR